



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,
DANA BAGI HASIL PAJAK, DAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP
BELANJA MODAL DI PEMERINTAHAN
KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA UTARA
PERIODE TAHUN 2014-2019**

Skripsi

Diajukan Oleh:

Zulfahmi Rizki Rau Hsb.

022117193

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

OKTOBER 2021



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,
DANA BAGI HASIL PAJAK, DAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP
BELANJA MODAL DI PEMERINTAHAN
KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA UTARA
PERIODE TAHUN 2014-2019**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)



Ketua Program Studi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto,
Ak., MBA., CMA., C.A., CSEP., QIA)

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,
DANA BAGI HASIL PAJAK, DAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP
BELANJA MODAL DI PEMERINTAHAN
KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA UTARA
PERIODE TAHUN 2014-2019**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari : Selasa, tanggal 5 Oktober 2021

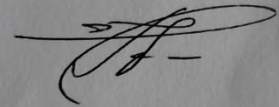
Zulfahmi Rizki Rau Hsb

022117193

Disetujui,

Dosen Penguji

(Monang Situmorang, Drs., Ak., M.M., CA)



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,
DANA BAGI HASIL PAJAK, DAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP
BELANJA MODAL DI PEMERINTAHAN
KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA UTARA
PERIODE TAHUN 2014-2019**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari : Selasa, tanggal 5 Oktober 2021

Zulfahmi Rizki Rau Hsb

022117193

Disetujui,

Dosen Penguji

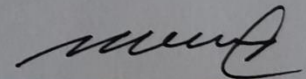
(Monang Situmorang, Drs., Ak., M.M., CA)

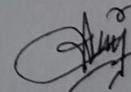
Ketua Komisi Pembimbing

(Dr.H. Akhsanul Haq., Ak., MBA., CMA., CFE., CFA., CA)

Anggota Komisi Pembimbing

(May Mulyaningsih, S.E., M.Ak., CFA)





Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfahmi Rizki Rau Hsb
Nomor Pokok Mahasiswa : 022117193
Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Di Pemerintahan Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 5 Oktober 2021



Zulfahmi Rizki Rau Hsb

022117193

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan,
tahun 2021 Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah,, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

ZULFAHMI RIZKI RAU HSB, 022117193. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Di Pemerintahan Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019. Di bawah bimbingan : AKHSANUL HAQ dan MAY MULYANINGSIH. 2021.

Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menjelaskan pengaruh PDRB, PAD, DAU, DAK, DBHP, SiLPA terhadap belanja modal di pemerintahan kota/kabupaten di Sumatera Utara periode tahun 2014-2019, dan pengaruh PDRB, PAD, DAU, DAK, DBHP, SiLPA secara simultan di pemerintahan kota/kabupaten di Sumatera Utara tahun 2014-2019.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini 23 kota/kabupaten di provinsi Sumatera Utara. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data kuantitatif regresi data panel menggunakan program Eviews 9.

Hasil penelitian ini menunjukkan PDRB berpengaruh, PAD tidak berpengaruh, DAU tidak berpengaruh, DAK berpengaruh, DBHP tidak berpengaruh, SiLPA berpengaruh, dan PDRB, PAD, DAU, DAK, DBHP, dan SiLPA berpengaruh simultan.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat mengajukan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019”. Skripsi ini merupakan syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Universitas Pakuan.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari masalah. Hal tersebut dapat diatasi berkat adanya, bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan kemudahan untuk penulis selama menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah penulis Sukhrawardi Hasibuan dan Almarhumah Ibu penulis Anni Marlina Hutasuhut.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. Selaku Asisten Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr.H. Akhsanul Haq., Ak., MBA., CMA., CFE., CFA., CA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penelitian penulis serta memberikan berbagai saran agar penelitian yang dihasilkan menjadi lebih baik.
7. Ibu May Mulyaningsih, S.E., M.Ak., CFA. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, arahan, petunjuk, motivasi, dukungan, dan nasehat agar penelitian yang dihasilkan menjadi lebih baik.
8. Bapak Monang Situmorang Drs, Ak., MM., CA., PIA. Selaku Dosen Penguji I Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.

9. Ibu Wiwik Budianti S.E., M.Si., Selaku Dosen Penguji II Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.
10. Ibu Siti Maimunah, S.E., M.Si., CPSP., CPMP., CAP. Selaku Dosen Penguji Seminar yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.
11. Bapak Ir. Zul Azhar, M.M. Selaku Dosen Wali penulis yang telah banyak membantu dan memberikan arahan selama masa studi.
12. Kepada saudara dan saudari penulis, Humala Dian Hasibuan, Diana Silawati Hasibuan, Andi Mukhtar Hasibuan, Dina Agustini Hasibuan, dan Azis Fakhri Hasibuan yang telah memberikan dukungan baik moral dan material.
13. Kepada Saudara dan Saudari Ipar penulis, Oktarini Khamilah Siregar, Akhiruddin Marbun, Hana Karlina, dan Ismail Pasaribu yang telah memberikan dukungan baik moral dan material.
14. Para Dosen dan Staff Pengajar Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
15. Sahabat-sahabat seperjuanganku yaitu, Muhammad Mufti Lutfi, Ananda Nursyaf Alfariz, Agil Maulana, Dias Tri Damara, Yudha Ikawira, dan Reza Putra yang selalu menemani dan menyemangati penulis selama masa perkuliahan.
16. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
17. Kepada rekan-rekan Kelas E angkatan 2017 yang telah bersama-sama menempuh studi di Universitas Pakuan.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam mengerjakan penelitian ini, semoga hasil penelitian ini nantinya bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca, penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bogor, 5 Oktober 2021

Penulis

Zulfahmi Rizki Rau Hsb

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	11
1.2.1 Identifikasi Masalah	11
1.2.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	12
1.3.1 Maksud Penelitian	12
1.3.2 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.4.1 Kegunaan Akademis	12
1.4.2 Kegunaan Praktis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	14
2.2 Pendapatan Asli Daerah	15
2.3 Dana Alokasi Umum	15
2.4 Dana Alokasi Khusus	16
2.5 Dana Bagi Hasil Pajak	16

2.6	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.....	17
2.7	Belanja Modal.....	17
2.8	Penelitian Sebelumnya.....	18
2.9	Kerangka Pemikiran.....	44
2.9.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal.....	44
2.9.2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.....	45
2.9.3	Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal.....	45
2.9.4	Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.....	47
2.9.5	Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Modal.....	47
2.9.6	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal.....	54
2.10	Hipotesis Penelitian.....	49
BAB III METODE PENELITIAN		50
3.1	Jenis Penelitian.....	50
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	50
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	50
3.4	Operasionalisasi Variabel.....	51
3.5	Metode Penarikan Sampel.....	53
3.6	Metode Pengumpulan Data.....	55
3.7	Metode Pengolahan/Analisis Data.....	55
3.7.1	Estimasi Model Regresi Data Panel.....	55
3.7.1.1	<i>Common Effect Model (CEM)</i>	56
3.7.1.2	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	56
3.7.1.3	<i>Random Effect Model (REM)</i>	56
3.7.1.4	Uji <i>Chow</i>	56
3.7.1.5	Uji <i>Hausman</i>	57
3.7.1.6	Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	57

3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	57
3.7.2.1	Uji Autokorelasi.....	58
3.7.2.2	Uji Heteroskedastisitas.....	58
3.7.3	Uji Hipotesis	58
3.7.3.1	Uji t	58
3.7.3.2	Uji F	59
3.7.3.3	Uji R ² Koefisien Determinasi (R ²).....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		60
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	60
4.2	Analisis Data	75
4.2.1	Statistik Deskriptif	76
4.2.2	Uji Estimasi Model Regresi Data Panel.....	77
4.2.2.1	Uji <i>Chow</i>	77
4.2.2.2	Uji <i>Hausman</i>	78
4.2.3	Uji Asumsi Klasik.....	78
4.2.3.1	Uji Autokorelasi	79
4.2.3.2	Uji Heteroskedastisitas.....	79
4.2.4	Analisis Regresi	80
4.2.5	Pengujian Hipotesis	82
4.2.5.1	Uji t	82
4.2.5.2	Uji F	83
4.2.5.3	Uji Koefisien Determinasi	84
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian	84
4.3.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal	85
4.3.2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	85
4.3.3	Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal.....	86
4.3.4	Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.....	86
4.3.5	Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Modal	87

4.3.6	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal	87
4.3.7	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal.....	88
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		90
5.1	Simpulan	90
5.2	Saran.....	90
	Daftar Pustaka	92
	Daftar Riwayat Hidup	96
	Lampiran	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2.2 : Matriks Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 3.1 : Operasionalisasi Variabel	51
Tabel 3.2 : Tabel Populasi.....	53
Tabel 3.3 : Tabel Sampel.	54
Tabel 3.4 : Uji Darbin Wattson	58
Tabel 4.1 : Tabel Sampel	60
Tabel 4.2 : Belanja Modal Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019	62
Tabel 4.3 : PDRB Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019.....	64
Tabel 4.4 : PAD Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019.....	66
Tabel 4.5 : DAU Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019	68
Tabel 4.6 : DAK Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019	70
Tabel 4.7 : DBHP Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019	72
Tabel 4.8 : SiLPA Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019	74
Tabel 4.9 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	76
Tabel 4.10 : Hasil Uji <i>Chow</i>	77
Tabel 4.11 : Hasil Uji <i>Hausman</i>	78
Tabel 4.12 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	80
Tabel 4.13 : Hasil Regresi Panel dengan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	81
Tabel 4.14 : Hasil Uji t.....	82
Tabel 4.15 : Hasil Uji F.....	83
Tabel 4.16 : Hasil Uji R^2	84
Tabel 4.17 : Hasil Hipotesis Penelitian	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Belanja Modal Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019.....	4
Gambar 1.2 : PDRB Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019.....	5
Gambar 1.3 : PAD Modal Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019.....	6
Gambar 1.4 : DAU Modal Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019	7
Gambar 1.5 : DAK Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019.....	8
Gambar 1.6 : DBHP Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019.....	9
Gambar 1.7 : SiLPA Kota Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019	10
Gambar 2.1 : Konstelasi Penelitian.....	48
Gambar 4.1 : Belanja Modal Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019.....	63
Gambar 4.2 : PDRB Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019.....	65
Gambar 4.3 : PAD Modal Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019.....	67
Gambar 4.4 : DAU Modal Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019	69
Gambar 4.5 : DAK Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019.....	71
Gambar 4.6 : DBHP Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019.....	73
Gambar 4.7 : SiLPA Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019	75
Gambar 4.8 : Skema Autokorelasi	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	97
Lampiran 2 : Hasil Olah Data Eviews.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan meminimalkan ketidakseimbangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menggali pendapatan dan melaksanakan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan, dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat lebih meningkatkan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan daerah menurut potensi masing-masing.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik tentu saja merupakan sesuatu yang sangat dicita-citakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Senada dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi juga sangat diharapkan dapat tercapai. Adapun indikasi dari pembangunan ekonomi adalah peningkatan produktivitas serta pendapatan per kapita yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Dalam usaha peningkatan pembangunan ekonomi, Pemerintah berupaya mengelola sumber daya dengan sebaik mungkin melalui berbagai cara, salah satunya dengan cara bermitra dengan masyarakat guna membuka lapangan pekerjaan baru di daerah tersebut. Pada umumnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan belanja modal meskipun terkadang jumlahnya tidak terlalu signifikan (Mundiroh, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh sebab itu kemampuan suatu daerah untuk menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di daerah tersebut. Di samping hal tersebut semakin besarnya kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintahan pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber yang berasal dari luar PAD karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah itu sendiri demi kelancaran dan penyelenggaraan urusan daerahnya (Suci, 2019).

PAD dari pajak, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Besarnya PAD menjadi salah satu bagian yang menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 12 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah otonom. DAU merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peranan DAU terletak pada kemampuan untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Widiasih dan Gayatri, 2017).

Pemerintah Pusat memberi pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Pungky, 2011).

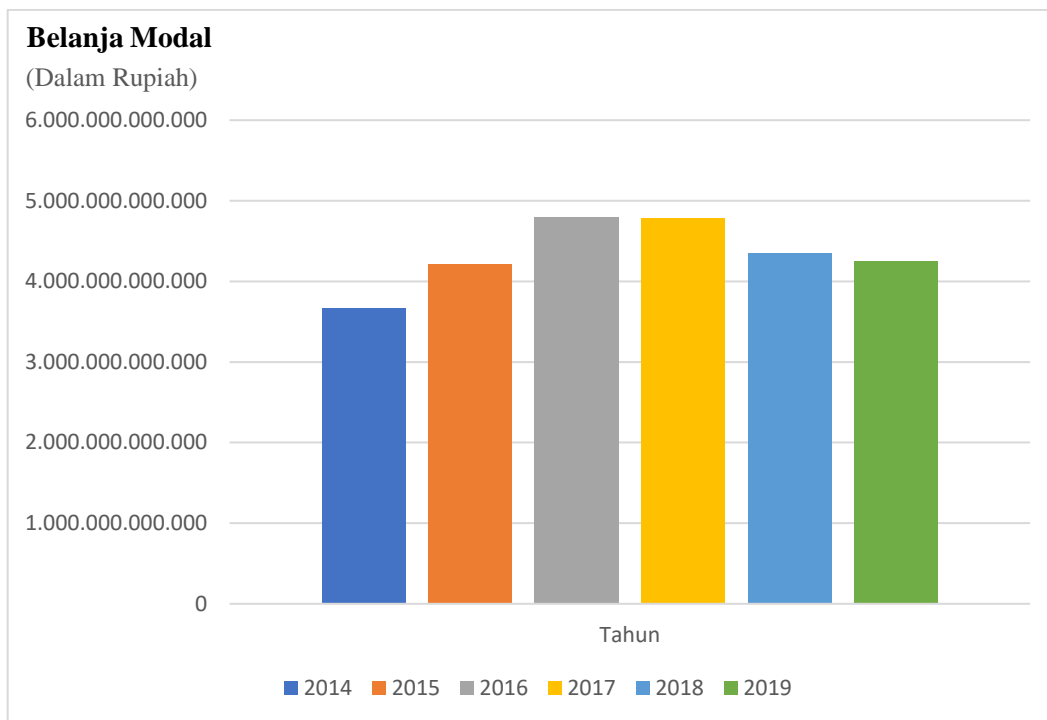
Berdasarkan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama berkendaraan dan motor, sumber pembiayaan daerah bukan hanya berasal dari PAD namun terdapat sumber pembiayaan lain salah satunya adalah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP) yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. DBHP Daerah yang dimaksud adalah pajak provinsi yang mencakup pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor,

pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pendapatan DBHP Provinsi Kabupaten/Kota harus diupayakan karena pendapatannya akan berdampak pada kemampuan pembiayaan daerah sehubungan dengan fungsi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah (Maharani, Husaini dan Sunarti, 2017).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan selain dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah. SiLPA dapat digunakan sebagai dana pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Jumlah SiLPA yang ideal dapat digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal melingkupi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah dari belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Henri, 2015).

Berikut grafik Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, DBHP dan SiLPA Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Utara yang menggunakan *purposive sampling* sehingga didapatkan sampel sebanyak 23 Kota/Kabupaten yang terdiri dari 16 Kabupaten dan 7 kota, dari populasi sebanyak 33 Kota/Kabupaten, yang disajikan pada grafik berikut:

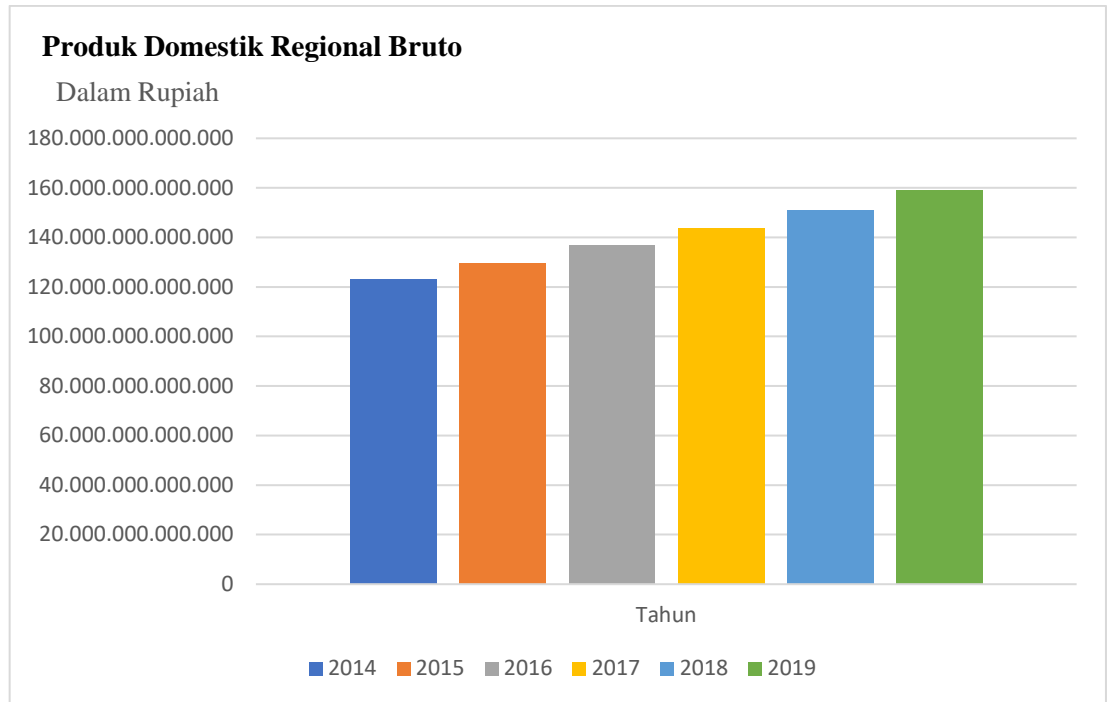


Sumber: BPS Sumatera Utara, 2021

Gambar 1.1

Belanja Modal Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019

Komponen Belanja Modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Peningkatan alokasi Belanja Modal dalam bentuk aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Tersedianya sarana/prasarana publik yang memadai akan merangsang transaksi ekonomi lokal. Peningkatan Belanja Modal terutama untuk proyek-proyek infrastruktur diharapkan dapat mendukung peningkatan pertumbuhan investasi di daerah, yang selanjutnya dapat meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat, dilihat dari grafik Belanja Modal Sumatera Utara diatas mengalami fluktuasi dan diharapkan kedepannya Pemerintah Sumatera Utara dapat lebih meningkatkan Belanja Modalnya dan dialokasikan untuk pembangunan yang produktif.

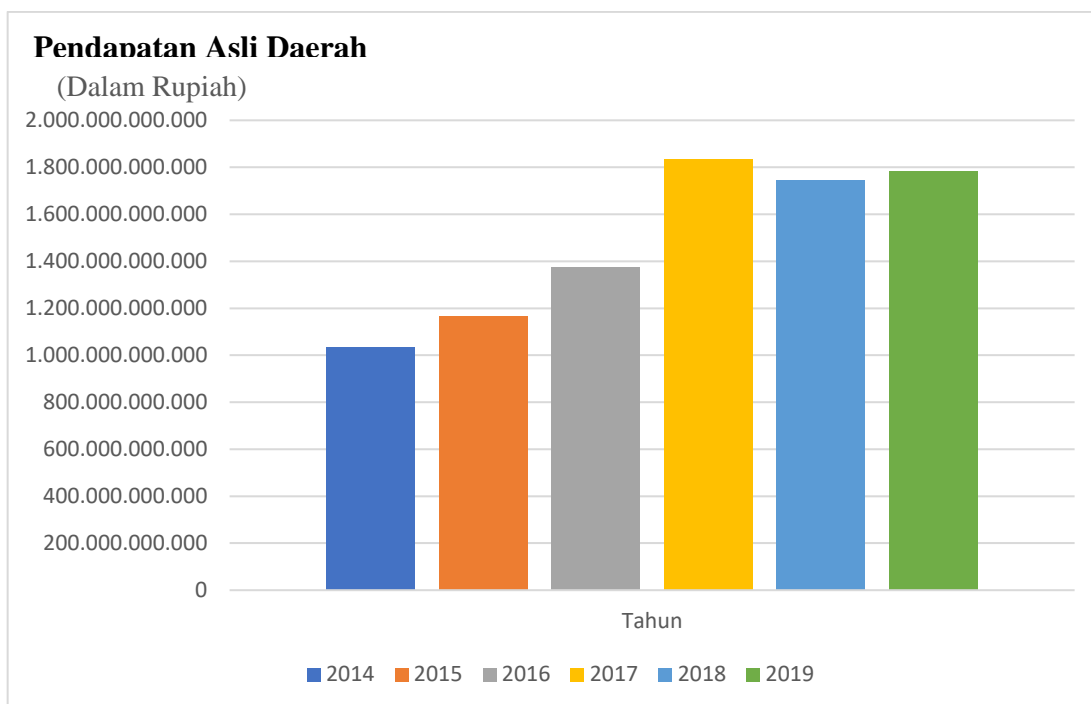


Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

Gambar 1.2

PDRB Kota/Kabupaten Sumata Utara 2014-2019

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Pada Grafik PDRB Sumatera Utara diatas dapat dilihat dari tahun 2014-2019 stabil mengalami peningkatan.

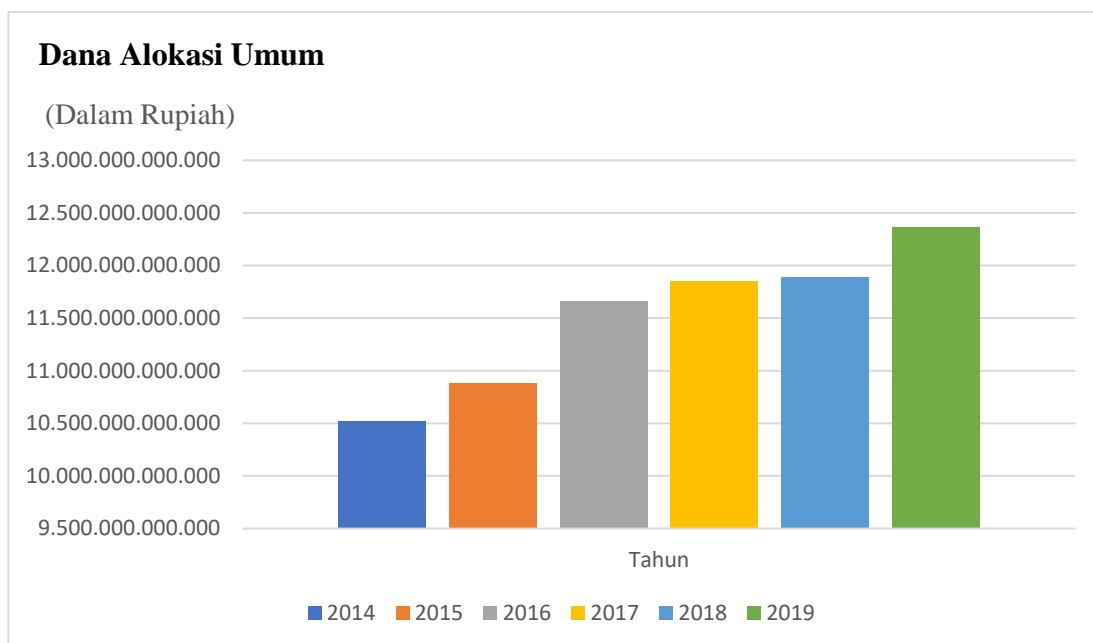


Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

Gambar 1.3

PAD Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019

Kemudian pada grafik PAD di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD yang ada di Sumatera Utara mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2014-2017, dan mengalami fluktuasi pada tahun 2017-2019. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan yang dilakukan oleh lembaga terkait di Provinsi Sumatera Utara cukup baik. Meningkatnya realisasi PAD ditopang oleh besarnya sumber-sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD.

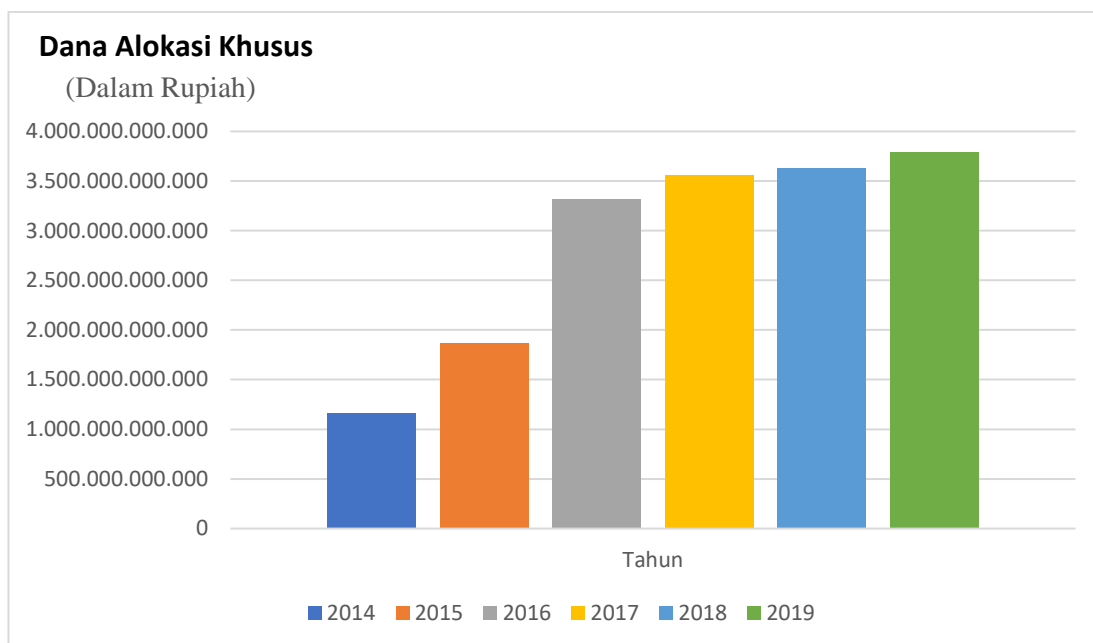


Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

Gambar 1.4

DAU Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase Dana Alokasi Umum yang diterima dari 23 kota/kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara terlihat bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Jawa Timur tergolong masih tinggi dikarenakan masih banyak kabupaten/kota yang tingkat penerimaan Dana Alokasi Umum-nya cukup tinggi. Semakin besar penerimaan Dana Alokasi Umum yang merupakan sumber pendapatan daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal di Sumatera Utara. Akan tetapi, dengan semakin besarnya persentase Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah, artinya bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masihlah tinggi.

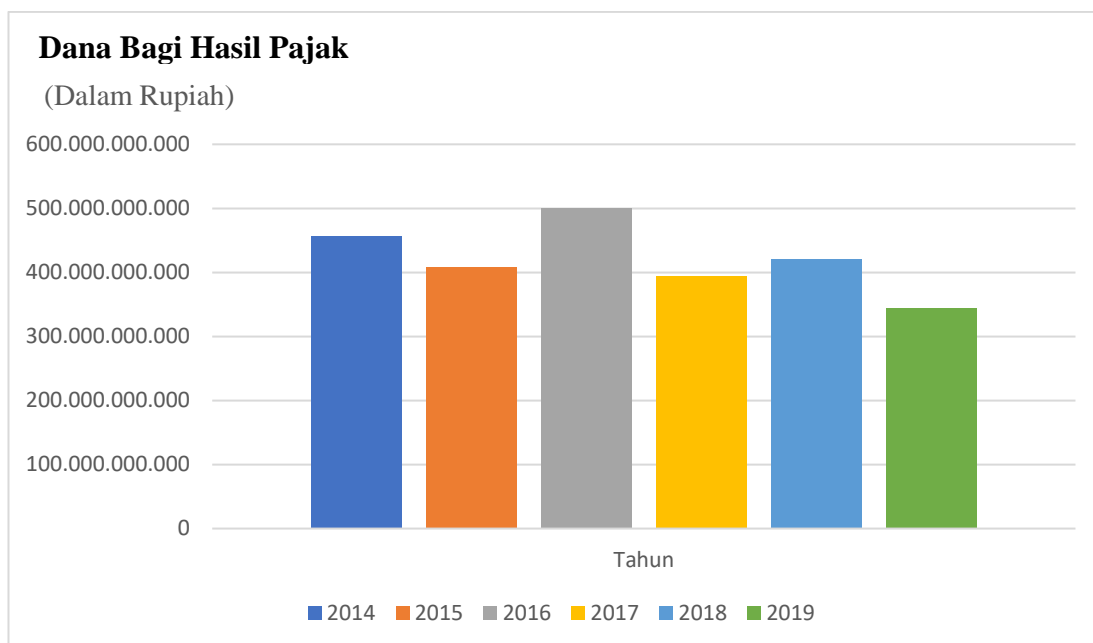


Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

Gambar 1.5

DAK Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019

DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen Belanja Modal. Dapat dilihat dari grafik DAK Sumatera Utara dari tahun 2014-2019 mengalami peningkatan signifikan dan diharapkan dapat memberikan pengaruh besar terhadap Belanja Modal.

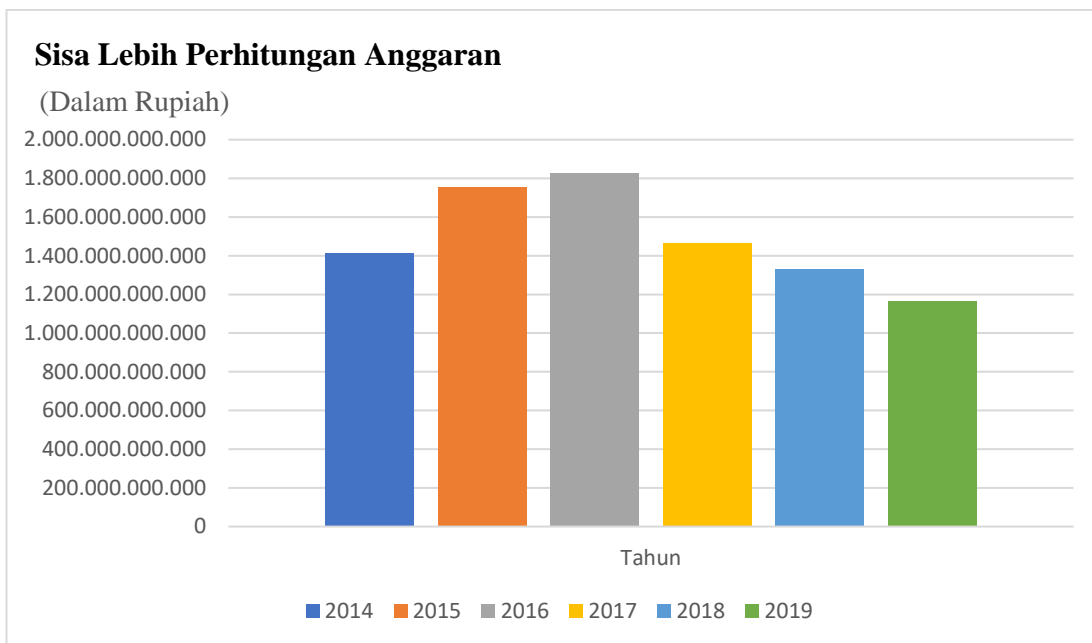


Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

Gambar 1.6

DBHP Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Pada grafik DBHP Sumatera Utara diatas dapat dilihat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dan dari sumber penerimaan yang lain DBHP merupakan penerimaan yang jumlahnya paling kecil, namun diharapkan dapat meningkatkan Belanja Modal.



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

Gambar 1.7

SiLPA Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019

Sumber lain untuk membiayai belanja modal adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA dapat digunakan sebagai dana pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Dari grafik di atas data SiLPA di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dan SiLPA diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal. Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran aset tetap atau aset lainnya yang menambah nilai aset tersebut yang memberi manfaat lebih dari satu periode, peneliti tertarik meneliti apakah di Provinsi Sumatera Utara telah memanfaatkan belanja modal-nya dengan baik, dikarenakan masih banyaknya daerah-daerah yang kurangnya Infrastruktur, Gedung, Bangunan, Jalan yang kurang memadai, dll. serta bagaimana pengaruh PDRB, PAD, DAU, DAK, DBHP, SiLPA terhadap belanja modal tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Di Pemerintahan Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019”**.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. Belanja Modal yang masih rendah menyebabkan pembangunan infrastruktur yang ada di 23 Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara masih sedikit dan tidak memadai
2. Belanja langsung lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Sehingga pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi tidak diikuti dengan naiknya Belanja Modal.
4. Pemanfaatan PAD yang belum maksimal oleh pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal.
5. Dari data PAD, DAU, DAK, DBHP, SiLPA dan Belanja Modal di Kota/Kabupaten Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa adanya kenaikan PAD, DAU, DAK, DBHP, dan SiLPA tidak selalu terjadi kenaikan Belanja Modal di beberapa Kota dan Kabupaten Sumatera Utara.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah PDRB harga konstan berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintahan Kota/ Kabupaten di Sumatera Utara?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintahan Kota/ Kabupaten di Sumatera Utara?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintahan Kota/ Kabupaten di Sumatera Utara?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintahan Kota/ Kabupaten di Sumatera Utara?
5. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintahan Kota/ Kabupaten di Sumatera Utara?
6. Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintahan Kota/ Kabupaten di Sumatera Utara?
7. Apakah PDRB harga konstan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh simultan terhadap belanja modal di Pemerintahan Kota/ Kabupaten di Sumatera Utara?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh dari variabel bebas yaitu PDRB Harga Konstan, PAD, DAU, DAK, DBHP, dan SiLPA terhadap variabel terikat yaitu Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Sumatera Utara. Menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran yang dapat meminimalkan penyebab timbulnya permasalahan yang diteliti. Selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam upaya pengembangan ilmu yang diterima proses perkuliahan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.
2. Untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.
3. Untuk menguji apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.
4. Untuk menguji apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.
5. Untuk menguji apakah Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.
6. Untuk menguji apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.
7. Untuk menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh simultan terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup dua hal yaitu kegunaan praktis dan akademis, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Hasil Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu bagi peneliti baik teoritis maupun praktis mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terkait Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Pemerintah Daerah
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal.
2. Pemerintah Pusat
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi masukan kepada pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal.
3. Dirjen Pajak
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi masukan terhadap Direktorat Jenderal Pajak atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh).
4. Masyarakat
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi informasi terhadap masyarakat berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan Ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah (Permana dan Rahardjo, 2013).

Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. Untuk tingkat wilayah, Provinsi maupun Kota/Kabupaten digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah/daerah tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam yaitu: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian perhitungan berdasarkan harga konstan maka perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi riil dapat dihitung (Adisasmita, 2013).

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang No.28 Tahun 2009 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana pada pemerintah pusat. PAD didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain sebagainya.

Masyarakat mengharapkan adanya fasilitas dari pemerintah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam upaya peningkatan perekonomian. Adapun cara yang mungkin dapat dicoba adalah dengan menambah peluang untuk investasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya yang dapat memberikan kemudahan serta daya tarik (Mundiroh, 2019). Daerah yang mempunyai sarana dan prasarana yang baik dan memadai dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut, sehingga akan menambahkan PAD. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Darwanto dan Yustikasi, 2007). Berdasarkan bukti empiris tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi Belanja modal.

2.3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55/2005). Dana Alokasi Umum tersebut dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang dialokasikan untuk Pemerataan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah (Sari, Kepramareni dan Novitasari, 2017). DAU merupakan komponen terbesar di dana perimbangan dan perannya sangat strategis untuk menciptakan pemerataan dan keadilan antar suatu daerah. Proporsinya yang besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintahan di suatu daerah.

Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh dana alokasi umum yang relatif besar (Aditya, Eka dan Maryono, 2018).

2.4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan pasal 162 Ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar DAK ini diatur lebih lanjut dalam bentuk PP, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Arina, Koleangan dan Engka, 2019).

Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DAK meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat (Rifai, 2017).

2.5. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan melihat potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*, jenis-jenis DBH ada 2 yaitu: Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

Untuk mendukung tanggung jawab yang dilimpahkan, pemerintah daerah memerlukan sumber fiskal. UU No. 25/1999 menyatakan bahwa untuk tujuan tersebut pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak, dan pemerintah pusat harus mentransfer sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan pemerintah daerah (Syahputra, 2014).

DBHP merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pendapatan pajak provinsi dan pajak Kota/Kabupaten memiliki perbedaan yang besar. Perbedaan tersebut dikarenakan

pemungutan jenis-jenis pajak dengan pendapatan besar masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan vertikal yang terjadi antara pusat dan daerah, maka dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak antara pusat dan daerah. Pendapatan pajak provinsi setiap tahun yang dipungut dari masing-masing Kota/Kabupaten dibagikan berdasarkan persentase yang telah ditentukan (Maharani, Husaini dan Sunarti, 2017).

2.6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 137 menyatakan bahwa, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan SiLPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SiLPA akan berbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan.

2.7. Belanja Modal

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja daerah diklasifikasikan menurut kelompok belanja berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, belanja tersebut terdiri dari Belanja pegawai, Belanja bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan keuangan dan Belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok belanja ini yaitu, Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa dan Belanja modal.

Belanja Modal berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti infrastruktur, peralatan, tanah, gedung dan aset tetap lainnya.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Pungky, 2011).

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimalisir kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu Langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

2.8. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian ataupun teori yang digunakan. Berikut ini beberapa penelitian yang dijadikan peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Kota/Kabupaten Sumatera Utara.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	<p>Edy Meianto, Betry, dan Cherrya Dhia Whenny</p> <p>Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan</p> <p>(2013)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Khusus</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Luas Wilayah Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum pada laporan realisasi APBD • Dana Alokasi Khusus pada laporan realisasi APBD • PAD: 1. Retribusi Daerah 2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. • Luas Wilayah Kabupaten/ Kota 	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. • Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. • Luas Wilayah berpengaruh secara positif dan

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Variabel Dependen: Belanja Modal	Sumatera Selatan • Belanja Modal: 1. Belanja tanah 2. Belanja gedung dan bangunan 3. Belanja aset dan lainnya		signifikan terhadap Belanja Modal. • Secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
2	Deva Yoga Permana dan Shiddiq Nur Rahardjo Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah) (2013)	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah	• PDRB berdasarkan setiap Kabupaten/ Kota Jawa Tengah • PAD: 1. Retribusi Daerah 2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah	Regresi Berganda	• Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Daerah Jawa Tengah. • Terdapat pengaruh positif pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Alokasi

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Khusus</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Belanja Modal</p>	<p>dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan,</p> <p>4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum pada laporan realisasi APBD • Dana Alokasi Khusus pada laporan realisasi APBD • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja tanah 2. Belanja gedung dan bangunan 3. Belanja aset dan lainnya 		<p>Anggaran Belanja Modal Daerah Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi anggaran Belanja Modal Daerah Jawa Tengah. • Tidak terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi anggaran Belanja Modal Daerah Jawa Tengah
3	Dinda Anggita Lukha	<p>Variabel Independen:</p> <p>Dana Bagi Hasil Pajak</p>		Regresi Berganda	

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara (2013)	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Variabel Dependen Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Bagi Hasil Pajak pada laporan realisasi APBD • Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam pada laporan realisasi APBD • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja tanah 2. Belanja gedung dan bangunan 3. Belanja aset dan lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Dana bagi hasil pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara. • Dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara.
4	Luh Putu Rani Mayasari, Ni Kadek Sinarwati, dan Gede Adi Yuniarta Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Kabupaten Buleleng • PAD: 	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal • Terdapat

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng (2014)	Dana Alokasi Umum Variabel Dependen: Belanja Modal	1. Retribusi Daerah 2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. •Dana Alokasi Umum pada laporan realisasi APBD • Belanja Modal: 1. Belanja tanah 2. Belanja gedung dan bangunan 3. Belanja aset dan lainnya		pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal •Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
5	Junian Syahputra Pengaruh Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Barat (2014)	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil Pajak Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	• Dana Bagi Hasil Pajak pada laporan realisasi APBD (X1) • PDRB Kabupaten Aceh (Y1)	Regresi Linier Sederhana	•Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil regresi diperoleh bahwa bagi hasil pajak berpengaruh

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat.
6	<p>Erdi Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi</p> <p>(2016)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Belanja Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Daerah 2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. • Dana Alokasi Umum pada laporan realisasi APBD • PDRB Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 • 1. Belanja tanah 	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. • Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal • Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. • Pertumbuhan Ekonomi

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			2. Belanja gedung dan bangunan 3. Belanja aset dan lainnya		tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. • Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal. Keterbatasan
7	Yunistin Ndede, Jullie J. Sondakh, dan Winston Pontoh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Manado (2016)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Khusus	• PAD: 1. Retribusi Daerah 2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. • Dana Alokasi Khusus pada laporan realisasi APBD	Regresi Linier Berganda	• Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal yang dicapai oleh pemerintah Kota Manado tidak berpengaruh secara signifikan.. • Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dicapai pemerintah Kota Manado berpengaruh signifikan terhadap pengalokasia

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Variabel Dependen:</p> <p>Belanja Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Belanja tanah • 2. Belanja gedung dan bangunan • 3. Belanja aset dan lainnya 		<p>n anggaran belanja modal yang terealisasi di Kota Manado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
8	<p>Rosita N. Laranga, Daisy S.M. Engka, dan George M.V. Kawung</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun (2004 – 2013)</p> <p>(2017)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Dana Alokasi Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Daerah 2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. • Dana Alokasi Khusus pada laporan realisasi APBD 	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRBD di Kabupaten Halmahera Utara. • Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB di

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Pertumbuhan Ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada laporan realisasi APBD • PDRB Kabupaten Halmahera Utara 		<p>Kabupaten Halmahera Utara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Halmahera Utara.
9	<p>Desak Gede Yudi Atika Sari, Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gde Novitasari</p> <p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali</p> <p>(2017)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB berdasarkan setiap Kabupaten/ Kota Bali • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Daerah 2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. • Pendapatan Asli Daerah positif terhadap alokasi Belanja Modal

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Dana Perimbangan</p> <p>Sisa Lebih Pembiayaan</p> <p>Variabel Dependen: Alokasi Belanja Modal</p>	<p>yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan pada laporan Realisasi APBD • Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada laporan realisasi APBD • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja tanah 2. Belanja gedung dan bangunan 3. Belanja aset dan lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal • Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal • Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal • Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
10	Rachmawati A. Rifai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah (2017)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil Variabel Dependen: Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: 1. Retribusi Daerah 2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. • Dana Alokasi Umum pada laporan realisasi APBD • Dana Alokasi Khusus pada laporan realisasi APBD • Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada laporan realisasi APBD • Belanja Modal: 	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. • DAU memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal dengan arah positif. • DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. • DBH memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja modal. • Berdasarkan hasil

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			1. Belanja tanah 2. Belanja gedung dan bangunan 3. Belanja aset dan lainnya		penelitian diperoleh bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
11	Dina Mei Eka Aditya, dan Maryono Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan Dan Sulawesi) (2018)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Daerah 2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. • Dana Alokasi Umum pada laporan realisasi APBD • Dana Alokasi Khusus pada laporan realisasi APBD 	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. • Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. • Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Dana Bagi Hasil</p> <p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada laporan realisasi APBD • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja tanah 2. Belanja gedung dan bangunan 3. Belanja aset dan lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal • Variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal.
12	<p>Sri Cahyaning</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015</p> <p>(2018)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Dana Alokasi Umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Daerah 2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. • Dana Alokasi Umum pada laporan realisasi APBD 	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur • Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh secara parsial

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Dana Hasil Bagi</p> <p>Pertumbuhan Ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada laporan realisasi APBD • PDRB berdasarkan setiap Kabupaten/ Kota Jawa Timur 		<p>terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur</p> <p>Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating tidak mampu dalam memoderasi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur • Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating tidak mampu

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja tanah 2. Belanja gedung dan bangunan 3. Belanja aset dan lainnya 		<p>dalam memoderasi Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating mampu dalam memoderasi Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur • Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai uji F sebesar 141,009 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa naik dan

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					turunnya Alokasi Belanja Modal yang diperoleh oleh Kabupaten/ Kota dipengaruhi oleh naik dan turunnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil yang dimiliki oleh Kabupaten/ Kota dan dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi
13	<p>Nurmala Sari, Gustian Djuanda dan Sarwani</p> <p>Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi (2018)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Dana Perimbangan</p> <p>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan pada laporan Realisasi APBD • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada laporan realisasi APBD • PAD: 1. Retribusi Daerah 	Regresi Data Panel	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana perimbangan terhadap belanja modal • Terdapat pengaruh signifikan antara dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal • Terdapat pengaruh signifikan

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Belanja Modal	2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah • Belanja Modal: 1. Belanja tanah 2. Belanja gedung dan bangunan 3. Belanja aset dan lainnya		antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal • Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara dana perimbangan, dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal
14	Putri Suci Tri Mandani Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota Di Wilayah Jawa Timur (Perspektif Ekonomi Islam) (2019)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	• PAD: 1. Retribusi Daerah 2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan	Regresi Data Panel	• Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur periode 2014-2016

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Khusus</p> <p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p>	<p>asli daerah yang sah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum pada laporan realisasi APBD • Dana Alokasi Khusus pada laporan realisasi APBD • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja tanah 2. Belanja gedung dan bangunan 		<p>(Perspektif Ekonomi Islam).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur periode 2014-2016 (Perspektif Ekonomi Islam). • Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur periode 2014-2016 (Perspektif Ekonomi Islam). • Secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			3. Belanja aset dan lainnya		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur periode 2014-2016 (Perspektif Ekonomi Islam).
15	Siti Mundiroh Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah (2019)	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB berdasarkan setiap Kabupaten/ Kota Jawa Timur • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Daerah 2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi terbukti tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemda Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. • PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemda Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p data-bbox="676 566 839 629">Dana Alokasi Umum</p> <p data-bbox="676 1059 839 1122">Dana Bagi Hasil</p> <p data-bbox="676 1547 804 1610">Variabel Dependen:</p> <p data-bbox="676 1671 839 1733">Belanja Modal Daerah</p>	<p data-bbox="865 327 995 510">yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.</p> <ul data-bbox="865 544 1008 719" style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum pada laporan realisasi APBD <ul data-bbox="865 1032 995 1243" style="list-style-type: none"> • Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada laporan realisasi APBD <ul data-bbox="865 1671 995 1980" style="list-style-type: none"> • Belanja Modal: <ol data-bbox="865 1738 995 1980" style="list-style-type: none"> 1. Belanja tanah 2. Belanja gedung dan bangunan 3. Belanja aset dan lainnya 		<ul data-bbox="1209 544 1353 902" style="list-style-type: none"> • DAU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemda Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. <ul data-bbox="1209 1003 1353 1361" style="list-style-type: none"> • DBH tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemda Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. <ul data-bbox="1209 1619 1353 2004" style="list-style-type: none"> • Secara simultan, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, PAD, DAU dan DBH terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Pemda Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.
16	<p>Meylani M. Arina, Rosalina A.M. Koleangan, dan Deisy S.M. Engka</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado</p> <p>(2019)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Dana Bagi Hasil</p> <p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Daerah 2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. • Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada laporan realisasi APBD • Dana Alokasi Umum pada laporan realisasi APBD • Dana Alokasi Khusus pada laporan 	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. • Dana Bagi Hasil (DBH) bertanda negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. • Dana Alokasi Umum (DAU) bertanda negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. • Dana Alokasi Khusus

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Variabel Dependen:</p> <p>Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>realisasi APBD</p> <p>• PDRB Kota Manado</p>		<p>(DAK) bertanda negatif & tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>• Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perekonomian Kota Manado</p>
17	<p>Nur Imamah</p> <p>Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Timur (2020)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Dana Perimbangan</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Sisa Lebih Anggaran</p> <p>Belanja Modal</p>	<p>• Dana Perimbangan pada laporan Realisasi APBD</p>	<p>Regresi Linear Berganda</p>	<p>• Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur</p> <p>• Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Daerah 2. Pajak Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada laporan realisasi APBD • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja tanah 2. Belanja gedung dan bangunan 3. Belanja aset dan lainnya 		<p>daerah di Provinsi Jawa Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur,

Dari Penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yang meliputi variabel bebas, variabel terikat, unit analisis atau subyek yang diteliti, dan periode data yang diteliti. Yang nantinya akan digunakan sebagai perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pada penelitian ini memiliki persamaan pada variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi yaitu dengan Permana dan Rahardjo (2013), Mayasari, Sinarwati, dan Yuniarta (2014), Adyatma dan Oktaviani (2016), Sari, Kepramareni dan Novitasari (2017), dan Mundiroh (2019). Variabel bebas Pendapatan Asli Daerah juga terdapat pada penelitian Meianto, Betry dan Whenny (2013), Permana dan Rahardjo (2013), Mayasari, Sinarwati dan Yuniarta (2014), Adyatma dan Oktaviani (2016), Ndede, Sondakh, dan Pontoh (2016), Laranga, Engka, dan Kawung (2017), Sari, Kepramareni, dan Novitasari (2017), Rifai (2017), Aditya, dan Maryono (2018), Cahyaning (2018), Sari, Djuanda dan Sarwani (2018), Mandani (2019), Mundiroh (2019), Arina, Koleangan, dan Engka (2019), dan Imamah (2020). Pada variabel bebas Dana Alokasi Umum terdapat pada penelitian Meianto, Betry dan Whenny (2013), Permana dan Rahardjo (2013), Mayasari, Sinarwati dan Yuniarta (2014), Adyatma dan Oktaviani (2016), Sari, Kepramareni dan Novitasari (2017), Rifai (2017), Aditya, dan Maryono (2018), Cahyaning (2018), Mandani (2019), Mundiroh (2019), Arina, Koleangan dan Engka (2019), dan Imamah (2020). Persamaan variabel bebas Dana Alokasi Khusus terdapat pada penelitian Meianto, Betry dan Whenny (2013), Permana dan Rahardjo (2013), Ndede, Sondakh, dan Pontoh (2016), Laranga, Engka dan Kawung (2017), Sari, Kepramareni dan Novitasari (2017), Rifai (2017), Aditya, dan Maryono (2018), Mandani (2019), Arina, Koleangan dan Engka (2019), dan Imamah (2020). Persamaan variabel bebas Dana Bagi Hasil Pajak terdapat pada penelitian Lukha (2013) dan Syahputra (2014). Persamaan dengan Variabel bebas Selisih Lebih Perhitungan Anggaran terdapat pada penelitian Sari, Djuanda dan Sarwani (2018), Imamah (2020). Persamaan variabel terikat Belanja Modal yaitu terdapat pada Meianto, Betry dan Whenny (2013), Permana dan Rahardjo (2013), Lukha (2013), Sari, Kepramareni, dan Novitasari (2017), Rifai (2017), Aditya, dan Maryono (2018), Cahyaning (2018), Sari, Djuanda dan Sarwani (2018), Mandani (2019), Mundiroh (2019), dan Imamah (2020). Lokasi Penelitian yang sama dengan Lukha (2013) di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan sama dengan Sari, Djuanda dan Sarwani (2018) dan Mandani (2019) menggunakan regresi data panel.

Perbedaan pada metode penelitian yang digunakan, penulis menggunakan regresi data panel, unit analisis, lokasi penelitian dan periode penelitian yang berberda dengan peneliti-peneliti terdahulu. Pada penelitian Syahputra (2014), Laranga, Engka, dan Kawung (2017), dan Arina, Koleangan dan Engka (2019) memiliki perbedaan pada variabel terikat.

Tabel 2.2
Matriks Penelitian Terdahulu

Variabel	Dependen	
	Belanja Modal	
Independen	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Pertumbuhan Ekonomi	Luh Putu Rani Mayasari, Ni Kadek Sinarwati, dan Gede Adi Yuniarta (2014)	Deva Yoga Permana dan Shiddiq Nur Rahardjo (2013), Desak Gede Yudi Atika Sari, Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gde Novitasari (2017), Erdi Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani (2016), Siti Mundiroh (2019), Erdi Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani (2016)
Pendapatan Asli Daerah	Edy Meianto, Betry, dan Cherrya Dhia Whenny (2013), Deva Yoga Permana dan Shiddiq Nur Rahardjo (2013),), Luh Putu Rani Mayasari, Ni Kadek Sinarwati, dan Gede Adi Yuniarta (2014), Desak Gede Yudi Atika Sari, Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gde Novitasari (2017), Rachmawati A. Rifai (2017), Dina Mei Eka Aditya, dan Maryono (2018), Sri Cahyaning (2018), Putri Suci Tri Mandani (2019), Siti Mundiroh (2019), Nurmala Sari, Gustian Djuanda dan Sarwani (2018)	Erdi Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani (2016), Yunistin Ndede, Jullie J. Sondakh, dan Winston Pontoh (2016)
Dana Alokasi Umum	Deva Yoga Permana dan Shiddiq Nur Rahardjo (2013), Luh Putu Rani Mayasari, Ni Kadek Sinarwati, dan Gede Adi Yuniarta (2014), Erdi Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani (2016), Rachmawati A. Rifai (2017), Dina Mei Eka Aditya, dan Maryono (2018), Sri Cahyaning (2018), Putri Suci Tri Mandani (2019), Siti Mundiroh (2019)	Edy Meianto, Betry, dan Cherrya Dhia Whenny (2013),), Desak Gede Yudi Atika Sari, Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gde Novitasari (2017), Nur Imamah (2020)
Dana Alokasi Khusus	Yunistin Ndede, Jullie J. Sondakh, dan Winston Pontoh (2016) Rachmawati A. Rifai	Edy Meianto, Betry, dan Cherrya Dhia Whenny (2013), Deva Yoga Permana

Variabel	Dependen	
	Belanja Modal	
Independen	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
	(2017), Dina Mei Eka Aditya, dan Maryono (2018), Putri Suci Tri Mandani (2019), Nur Imamah (2020)	dan Shiddiq Nur Rahardjo (2013),), Desak Gede Yudi Atika Sari, Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gde Novitasari (2017)
Dana Bagi Hasil Pajak	Dinda Anggita Lukha (2013)	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Nurmala Sari, Gustian Djuanda dan Sarwani (2018), Nur Imamah (2020)	

2.9 Kerangka Pemikiran

2.9.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi salah satu faktor adanya pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan adanya pendapatan masyarakat sebagai faktor produksi juga meningkat. Dengan perkataan lain pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan diukur dengan menggunakan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atau pendapatan nilai akhir pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (satu tahun). PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah (Sari, Kepramareni dan Novitasari,2017).

Melalui desentralisasi fiskal diharapkan Pemda dapat mengoptimalkan sumber penerimaan yang ada guna mendorong peningkatan ekonomi daerah tersebut. Pernyataan ini sejalan dengan teori federalism. Asas desentralisasi yang diberlakukan dalam otonomi daerah memberikan kewenangan pada Pemerintah daerah (Pemda) untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan baru, dengan asumsi Pemda berhasil untuk melakukannya, maka seharusnya Pemda dapat secara mandiri membiayai pengeluarannya, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk belanja modal. Belanja modal yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik dan menarik minat para calon investor. Selain penting untuk pembangunan ekonomi, pembangunan fasilitas publik juga merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban Pemda terhadap masyarakat yang sudah berkontribusi dengan membayar pajak (Mundiroh, 2019).

Penelitian yang dilakukan Permana dan Rahardjo (2013) menyatakan hasil tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal. Yovita (2011) dalam penelitian Mayasari, Sinarwati, dan Yuniarta (2014) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H1: PDRB berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.

2.9.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah (Arina, Koleangan dan Engka, 2019).

Kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi daerah menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diikuti pula dengan peningkatan anggaran Belanja Modal yang signifikan sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal

Berdasarkan Penelitian Aditya, dan Maryono (2018) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan, selain itu menurut penelitian Rifai (2017) hasil penelitian diperoleh bahwa PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H2: PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.

2.9.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum merupakan transfer dari APBN pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam membantu keuangan daerah dalam mengatur atau mengurus sendiri keuangannya untuk tujuan desentralisasi. Pemerintah daerah masih banyak yang membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dalam meningkatkan pembangunan daerah.

Hal ini sejalan dengan tujuan dari Dana Alokasi Umum yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Cahyaning, 2018).

Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal sangat berpengaruh karena Dana Alokasi Umum yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dialokasikan untuk pembiayaan aset tetap, salah satunya dalam bentuk belanja jalan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Oleh sebab itu, jika Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah semakin tinggi maka Belanja Modal di daerah tersebut akan meningkat pula.

Penelitian Cahyaning (2018) menghasilkan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, sedangkan Aditya, dan Maryono (2018) menghasilkan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3: DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.

2.9.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Arina, Koleangan dan Engka, 2019).

Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah Kota/Kabupaten untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN yang diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah.

Pada penelitian Putri Suci Tri Mandani (2019) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, dan pada penelitian Sari, Kepramareni, dan Novitasari (2017) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Berdasarkan Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H4: DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.

2.9.5 Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Modal

Pemerintah pusat memberikan dana perimbangan yang salah satunya meliputi bagi hasil pajak (BHP) kepada pemerintah daerah untuk dikelola dengan sebagaimana mestinya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) (Syahputra, 2014).

DBH dialokasikan berdasarkan angka persentase tertentu guna membiayai pengeluaran pemda. Besaran penerimaan DBH suatu daerah tentunya akan meningkatkan besaran APBD. Untuk meningkatkan penerimaan DBH, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen DBH (Pajak atau SDA) manakah yang memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Besarnya realisasi DBH, yang terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam, selain dipengaruhi kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil.

Berdasarkan penelitian Lukha (2013) hasil regresi diperoleh bahwa bagi hasil pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H5: DBHP berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.

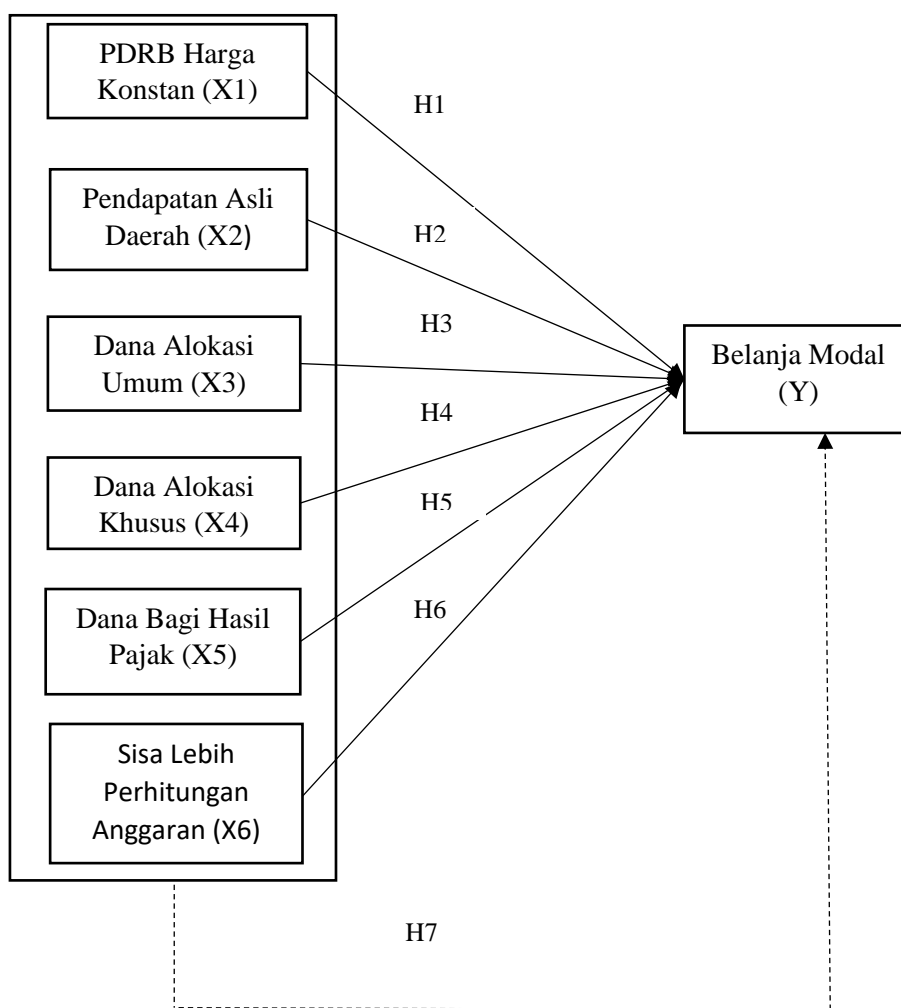
2.9.6 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal

SiLPA hanya terbentuk bila terjadi surplus dalam APBD dan terjadi Pembiayaan Neto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan, adanya surplus dalam APBD yang disebut sebagai SiLPA akan dijadikan sebagai sumber pendanaan pada periode selanjutnya sehingga SiLPA tahun anggaran sebelumnya memiliki pengaruh pada pengalokasian APBD periode selanjutnya. Dalam periode selanjutnya SiLPA akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan (Imamah, 2020).

Berdasarkan penelitian Sari, Djuanda dan Sarwani (2018) dan Imamah (2020) menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H6: SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.

Pada penelitian ini menjelaskan tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Sumatera Utara. Oleh karena itu peneliti membuat konstelasi penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Konstelasi Penelitian

Keterangan:

- > = Secara Parsial
- - - - -> = Secara Simultan

2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang adanya sesuatu atau kemungkinan adanya sesuatu, dengan diiringi perkiraan mengapa atau apa sebab adanya demikian. Dengan demikian, hipotesis masih harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

Dari pengertian hipotesis tersebut, penulis membuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: PDRB berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.
- H2: PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.
- H3: DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.
- H4: DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.
- H5: DBHP berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.
- H6: SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.
- H7: PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh simultan terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi ataupun pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian kuantitatif diistilahkan dengan model formal. Arti formal menunjukkan suatu metode pengukuran peristiwa kehidupan, dalam bentuk angka bukan hanya huruf. Jadi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan menguji teori-teori yang muncul karena munculnya suatu gejala atau fenomena dengan menggunakan bentuk angka atau statistik.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini terdapat 6 variabel bebas dan 1 variabel terikat, yaitu Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal. Untuk memperoleh data dan informasi maka penulis melakukan penelitian atas variabel-variabel tersebut pada *website* Badan Pusat Statistik Sumut, Badan Pusat Statistik merupakan Lembaga Pemerintah non-Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kota/Kabupaten yang sumber data analisisnya merupakan laporan statistik keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara. Lokasi Penelitian ini yaitu BPS Sumatera Utara yang bertempat di Jl. Asrama No.179, Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka. Data yang berupa angka tersebut selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah.

Sumber data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, data tersebut diperoleh dari laporan keuangan pemerintah Sumatera Utara.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan petunjuk bagaimana variabel diukur secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian, yaitu merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan yaitu, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Maka indikator dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	PDRB berdasarkan setiap Kota/Kabupaten pada laporan PDRB Sumatera Utara	<p>Tingkat Pertumbuhan Ekonomi</p> $\frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$ <p>PDRB_t= Produk Domestik Regional Bruto Tahun Berjalan</p> <p>PDRB_{t-1}=Produk Domestik Regional Bruto Tahun berjalan di (-) tahun lalu</p>	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (X2)	Pendapatan Asli Daerah yang ada pada laporan realisasi APBD	<p>PAD= PD + RD + Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan + LPS</p> <p>Keterangan :</p> <p>PAD = Pendapatan Asli Daerah</p> <p>PD = Pajak Daerah</p> <p>RD = Retribusi Daerah</p> <p>LPS = Lain-lain Pendapatan Yang Sah</p>	Rasio

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Dana Alokasi Umum (X3)	Dana Alokasi Umum pada laporan realisasi APBD	Alokasi Dasar + Celah Fiskal	Rasio
Dana Alokasi Khusus (X4)	Dana Alokasi Khusus pada laporan realisasi APBD	Kriteria Umum + Kriteria Khusus + Kriteria Teknis	Rasio
Dana Bagi Hasil Pajak (X5)	Dana Bagi Hasil Pajak pada laporan realisasi APBD	Pajak Bumi dan Bangunan + Pajak Penghasilan + Cukai Hasil Tembakau	Rasio
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X6)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada laporan realisasi APBD	Surplus/ Defisit + Pembiayaan Neto	Rasio
Belanja Modal (Y)	Belanja Modal pada laporan realisasi APBD	Belanja tanah + Belanja gedung dan bangunan + Belanja aset dan lainnya	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 33 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian/wakil dari populasi yang diteliti yaitu 23 Kota/Kabupaten yang terdiri dari 7 Kota dan 16 Kabupaten.

Tabel 3.2

Tabel Populasi

No.	Kota	No.	Kabupaten
1	Binjai	1	Asahan
2	Gunung Sitoli	2	Batu Bara
3	Medan	3	Dairi
4	Padangsidempuan	4	Deli Serdang
5	Pematangsiantar	5	Humbang Hasundutan
6	Sibolga	6	Karo
7	Tanjung Balai	7	Labuhanbatu
8	Tebing Tinggi	8	Labuhanbatu Selatan
		9	Labuhanbatu Utara
		10	Langkat
		11	Mandailing Natal
		12	Nias
		13	Nias Barat
		14	Nias Selatan
		15	Nias Utara
		16	Padang Lawas
		17	Padang Lawas Utara
		18	Pakpak Bharat
		19	Samosir
		20	Serdang Sebagai
		21	Simalungun
		22	Tapanauli Selatan
		23	Tapanauli Tengah
		24	Tapanauli Utara
		25	Toba Samosir

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2021

Metode penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive sampling* yaitu dengan cara menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berikut adalah kriteria yang digunakan peneliti:

1. Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2014-2019.
2. Pemerintah Kota/Kabupaten yang belanja modal < 300.000.000.000 di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014-2019.
3. Data PDRB dalam harga konstan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan Belanja Modal Di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014-2019.

Tabel 3.3

Tabel Sampel

No.	Kota	No.	Kabupaten
1	Sibolga	1	Nias
2	Tanjung Balai	2	Mandailing Natal
3	Pematang Siantar	3	Tapanauli Tengah
4	Tebing Tinggi	4	Tapanauli Utara
5	Binjai	5	Toba Samosir
6	Padangsidempuan	6	Labuhanbatu
7	Gunung Sitoli	7	Dairi
		8	Nias Selatan
		9	Humbang Hasundutan
		10	Pakpak Bharat
		11	Samosir
		12	Padang Lawas
		13	Labuhanbatu Selatan
		14	Labuhanbatu Utara
		15	Nias Utara
		16	Nias Barat

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2021

3.6. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling diatas maka pengumpulan data yang dipakai menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia (Putri, 2019), metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan, dokumen atau catatan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

3.7. Metode Pengolahan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan menggunakan Aplikasi EViews 9. Metode dan teknik analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

3.7.1 Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam melakukan suatu pengamatan terhadap sebuah fenomena atau peristiwa, tidak cukup hanya melakukan pengamatan tersebut terhadap unit-unit amatan dalam satu waktu tertentu saja, tetapi juga mengamati unit-unit tersebut pada berbagai periode waktu. Analisis regresi data panel adalah salah satu pendekatan pemodelan yang mengikut sertakan pengaruh waktu tersebut ke dalam model. Selain itu, pemodelan data panel secara umum akan memberikan informasi yang lebih informatif dibandingkan pemodelan yang hanya menggunakan data lintas individu (*cross section*) atau data deret waktu (*time series*) saja. Data panel sendiri merupakan data gabungan antara data lintas individu dan deret waktu (Kosmaryati dkk., 2019).

Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis data panel, digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dengan variabel bebas yang jumlahnya 5 (lima) (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) terhadap variabel terikat (Y).

Persamaan model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$BM = \alpha_{it} + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DAK_{it} + \beta_5 DBHP_{it} + \beta_6 SILPA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

BM (Y) = Belanja Modal

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Regresi Berganda

PDRB (X1) = Pertumbuhan ekonomi

PAD (X2) = Pendapatan Asli Daerah

DAU (X3) = Dana Alokasi Umum

DAK (X4)	= Dana Alokasi Khusus
DBHP (X5)	= Dana Bagi Hasil Pajak
SiLPA (X6)	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
i	= Unit sektor
t	= Unit waktu
ε	= <i>error term</i>

Untuk mengestimasi model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang digunakan antara lain:

3.7.1.1. Common Effect Model (CEM)

Merupakan pendekatan model data panel paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

3.7.1.2. Fixed Effect Model (FEM)

Model *fixed effect* mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu.

3.7.1.3. Random Effect Model (REM)

Model *random effect* mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada *random effect model* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error term* tiap-tiap individu. Keuntungan menggunakan REM yaitu menghilangkan *heteroskedastis*.

Untuk memilih model yang paling tepat dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dilakukan yaitu:

3.7.1.4. Uji Chow

Uji *Chow* adalah pengujian untuk menentukan model *fixed effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan untuk estimasi data panel. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Model *common effect*

H_1 = Model *Fixed Effect*

Kriteria pengujian ini adalah apabila nilai Prob. < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya dalam model estimasi regresi panel yang tepat digunakan *Fixed Effect* dan sebaliknya apabila nilai Prob. $> 0,05$ H_0 diterima dan H_1 ditolak maka model yang digunakan *common effect*.

3.7.1.5. Uji Hausman

Uji *Hausman* merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan.

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Model *Random effect*

H_1 = Model *Fixed effect*

Kriteria pengujian ini adalah apabila nilai Prob. $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya efek dalam model estimasi regresi panel yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect* model dan sebaliknya apabila nilai Prob. $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya dalam model estimasi regresi panel yang sesuai adalah *Random Effect*.

3.7.1.6. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* ini digunakan untuk memilih apakah data dianalisis menggunakan *Random Effect* atau *Common Effect*, pengujian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Model *Common Effect*

H_1 = Model *Random Effect*

Kriteria pengujian ini adalah apabila nilai Prob. $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya dalam model estimasi regresi panel yang tepat digunakan adalah *Random Effect* model dan sebaliknya apabila nilai Prob. $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya dalam model estimasi regresi panel yang sesuai adalah *Common Effect*.

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati dan Porter pada penelitian (Kosmaryati dkk., 2019), metode estimasi model panel pengaruh acak (*random effect*) menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS), sedangkan model panel pengaruh gabungan (*common effect*) dan model panel pengaruh tetap (*fixed effect*) menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Salah satu kelebihan metode GLS yaitu tidak perlu memenuhi asumsi klasik. Jadi, apabila model regresi menggunakan *random effect* maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Sebaliknya, apabila digunakan model regresi *common effect* atau *fixed effect* maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Menurut Gujarati dan Porter sangat kecil kemungkinan terjadi multikolinearitas pada data panel sehingga peneliti cukup melakukan uji autokorelasi dan uji heterokedastis.

3.7.2.1. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi dapat diketahui melalui Uji Durbin-Watson (*D-W Test*), adalah pengujian yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya korelasi serial dalam model regresi atau untuk mengetahui apakah di dalam model yang digunakan terdapat autokorelasi diantara variabel-variabel yang diamati.

Tabel 3.4

Uji Darbin Wattson

Hipotesis	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Imam Ghozali dan Dwi Ratmano, 2018

3.7.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Jika nilai probabilitas dari masing-masing variabel $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terdapat heteroskedastis pada model tersebut atau hasilnya data dalam kondisi homoskedastis. Sebaliknya, koefisien korelasi $< 0,05$ maka model terjadi heterokedastisitas.

3.7.3. Uji Hipotesis

3.7.3.1. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh parsial antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini uji (t) bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen yaitu PDRB, PAD, DAU, DAK, DBHP, dan SiLPA terhadap variabel terikat yaitu Belanja Modal di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara 2014-2019.

$H_0: b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6 = 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial (Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Sumatera Utara tahun 2014-2019).

H1: $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan secara parsial (Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Sumatera Utara tahun 2014-2019).

Dalam penelitian ini nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, dengan kriteria pengambilannya adalah :

H0: ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H1: diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

3.7.3.2. Uji F

Uji F menguji pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen yaitu PDRB, PAD, DAU, DAK, DBHP, dan SILPA terhadap variabel terikat yaitu Belanja Modal di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara 2014-2019 ($\alpha = 5\%$) kriteria pengujian secara parsial (uji F) dengan menggunakan rumus statistik sebagai berikut:

H0: $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6 = 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan (Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Sumatera Utara tahun 2014-2019).

H1: $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan (Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Sumatera Utara tahun 2014-2019).

Nilai F hitung akan dibandingkan dengan nilai F tabel dengan kriteria pengambilannya adalah:

H0 ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H1 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$.

3.7.3.3. Uji R^2 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*R square* atau R Kuadrat) atau disimbolkan dengan R^2 yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y) atau dengan kata lain, nilai koefisien determinasi atau *R Square* ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Y.

BAB IV

Hasil Penelitian

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Provinsi Sumatera Utara merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Utara Pulau Sumatera, berbatasan dengan Aceh di sebelah utara dan dengan Sumatera Barat serta Riau di sebelah selatan. Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 71.680 km². Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten dan kota yang terbagi menjadi 25 kabupaten dan 8 kota. Pada penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 23 Kota/Kabupaten yang terdiri dari 7 kota dan 16 Kabupaten dengan menggunakan metode penarikan sampel yaitu *purposive sampling*.

Tabel 4.1
Sampel Penelitian

No.	Kota	No.	Kabupaten
1	Sibolga	1	Nias
2	Tanjung Balai	2	Mandailing Natal
3	Pematang Siantar	3	Tapanauli Tengah
4	Tebing Tinggi	4	Tapanauli Utara
5	Binjai	5	Toba Samosir
6	Padangsidempuan	6	Labuhanbatu
7	Gunung Sitoli	7	Dairi
		8	Nias Selatan
		9	Humbang Hasundutan
		10	Pakpak Bharat
		11	Samosir
		12	Padang Lawas
		13	Labuhanbatu Selatan
		14	Labuhanbatu Utara
		15	Nias Utara
		16	Nias Barat

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2021

Berikut adalah kriteria yang digunakan peneliti:

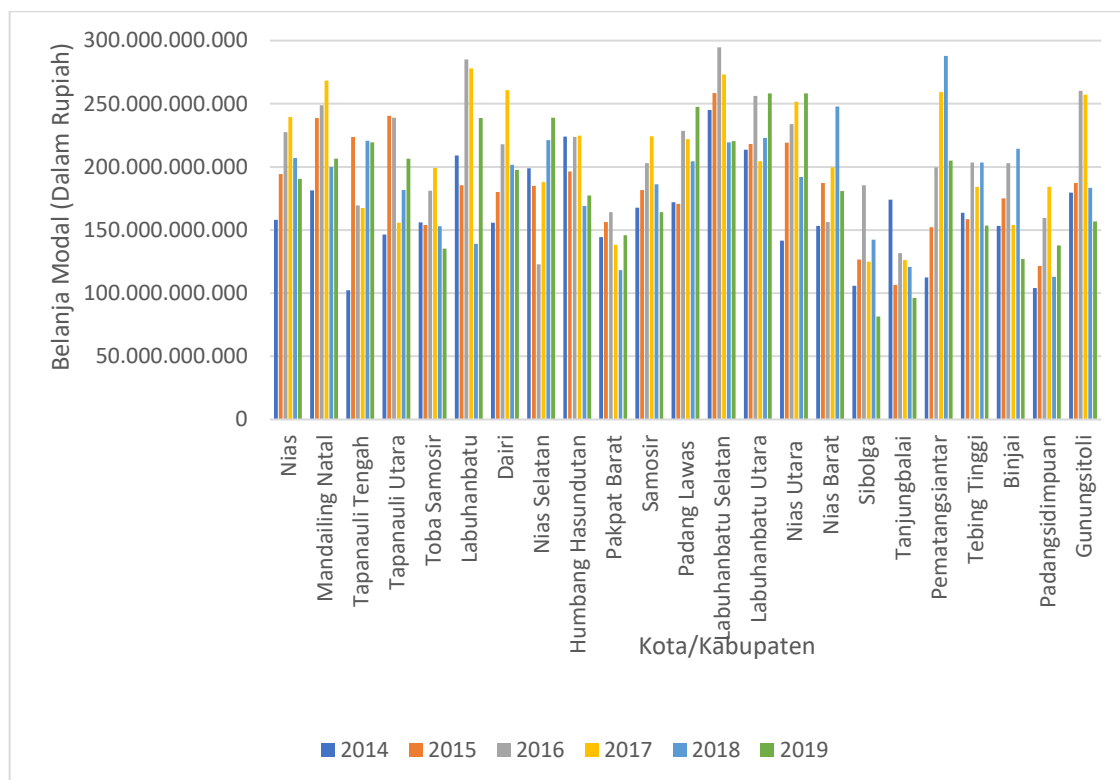
1. Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2014-2019.
2. Pemerintah Kota/Kabupaten yang belanja modal < 300.000.000.000 di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014-2019.
3. Data PDRB dalam harga konstan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Belanja Modal Di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014-2019.

Terdapat 6 variabel bebas dan 1 variabel terikat dalam penelitian ini yaitu, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), PAD, DAU, DAK, DBHP, SiLPA sebagai variabel bebas (X) dan Belanja Modal sebagai variabel terikat (Y). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara periode tahun 2014-2019. Unit analisis dalam penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2014-2019 yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal Pemerintah. Sumber data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, data tersebut diperoleh dari laporan keuangan pemerintah Sumatera Utara. Lokasi Penelitian ini yaitu bertempat di Jl. Asrama No.179, Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

Berikut Data Belanja Modal, PDRB, PAD, DAU, DAK, DBHP, dan SiLPA yang disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 4.2
Belanja Modal Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019 (dalam Rupiah)

Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nias	158.098.310.000	194.330.739.000	227.559.202.000	239.523.861.000	207.016.877.000	190.454.027.000
Mandailing Natal	181.377.548.000	238.677.825.000	248.898.512.000	268.243.398.000	199.849.015.000	206.392.843.000
Tapanauli Tengah	102.210.556.000	223.714.622.000	169.402.709.000	167.521.314.000	220.747.371.000	219.450.400.000
Tapanauli Utara	146.464.311.000	240.549.906.000	238.928.406.000	155.844.954.000	181.662.031.000	206.383.194.000
Toba Samosir	156.147.146.000	154.106.802.000	181.212.965.000	199.230.031.000	152.970.217.000	135.339.350.000
Labuhanbatu	209.025.598.000	185.515.383.000	285.089.741.000	277.921.021.000	139.178.414.000	238.729.010.000
Dairi	155.712.106.000	180.098.060.000	217.941.187.000	260.705.969.000	201.561.438.000	197.567.865.000
Nias Selatan	198.944.305.000	184.978.091.000	122.786.141.000	187.946.733.000	221.305.835.000	238.978.343.000
Humbang Hasundutan	223.948.004.000	196.275.197.000	223.630.078.000	224.702.954.000	168.860.964.000	177.278.522.000
Pakpat Barat	144.433.403.000	156.407.390.000	164.178.920.000	138.363.427.000	118.336.627.000	145.937.022.000
Samosir	167.757.876.000	181.611.819.000	202.913.344.000	224.240.859.000	186.274.945.000	164.093.834.000
Padang Lawas	171.951.495.000	170.639.986.000	228.440.428.000	221.963.650.000	204.458.004.000	247.484.629.000
Labuhanbatu Selatan	244.935.647.000	258.390.106.000	294.626.135.000	273.152.743.000	219.379.316.000	220.503.869.000
Labuhanbatu Utara	213.674.389.000	218.138.402.000	256.257.019.000	204.563.138.000	223.037.632.000	258.116.878.000
Nias Utara	141.607.543.000	219.043.274.000	233.739.122.000	251.675.870.000	192.092.727.000	258.215.520.000
Nias Barat	153.329.907.000	187.110.062.000	156.180.258.000	199.747.993.000	247.896.476.000	180.910.491.000
Sibolga	105.880.983.000	126.724.782.000	185.382.144.000	124.824.375.000	142.467.823.000	81.569.259.000
Tanjungbalai	174.063.400.000	106.732.069.000	131.747.679.000	126.156.230.000	120.906.484.000	96.299.502.000
Pematangsiantar	112.533.369.000	152.228.323.000	199.557.081.000	259.217.807.000	287.958.995.000	204.959.072.000
Tebing Tinggi	163.582.124.000	158.487.242.000	203.355.262.000	184.156.162.000	203.340.069.000	153.577.322.000
Binjai	153.284.846.000	174.972.076.000	202.943.192.000	154.059.962.000	214.254.227.000	127.213.320.000
Padangsidempuan	104.032.328.000	121.667.415.000	159.508.882.000	184.093.967.000	113.072.061.000	137.812.394.000
Gunungsitoli	179.745.680.000	187.221.924.000	260.138.209.000	257.218.076.000	183.521.284.000	156.757.477.000
Total	3.660.530.318.000	4.217.621.495.000	4.794.416.616.000	4.785.074.494.000	4.350.148.832.000	4.244.024.143.000



Sumber: BPS Sumatera Utara, 2021

Gambar 4.1

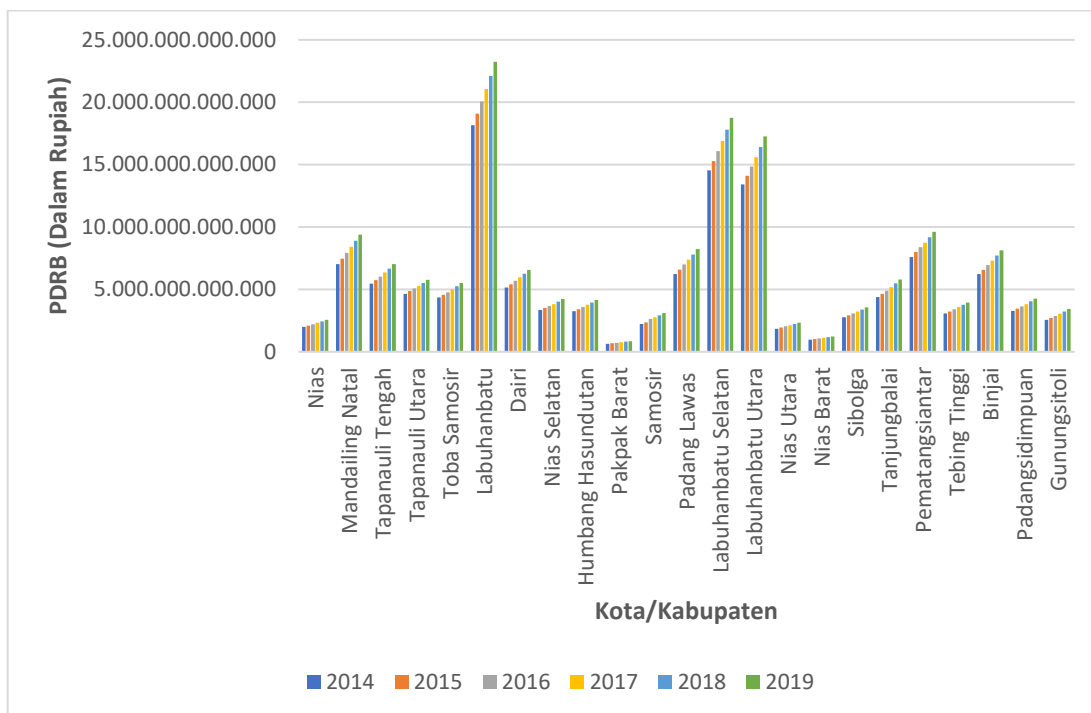
Belanja Modal Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019

Dapat dilihat dari gambar dan tabel tersebut merupakan data Belanja Modal di 23 Kota/Kabupaten di Sumatera Utara pada tahun 2014-2019, berdasarkan *time series* Belanja Modal tertinggi sebesar Rp 294.626.135.000 terdapat di Labuhanbatu Selatan pada tahun 2016, dan terendah sebesar Rp 81.569.259.000 terdapat di Sibolga Pada tahun 2019, sedangkan berdasarkan *cross section* Belanja Modal tertinggi di seluruh 23 Kota/Kabupaten terdapat pada tahun 2016 sebesar Rp 4.794.416.616.000 dan terendah terdapat pada tahun 2014 sebesar Rp3.660.530.318.000.

Tabel 4.3

PDRB Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019 (dalam ribuan Rupiah)

Kota/Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nias	1.997.749.570	2.108.035.880	2.214.153.330	2.325.014.220	2.429.731.000	2.563.030.000
Mandailing Natal	7.034.925.190	7.471.717.540	7.933.132.640	8.416.495.660	8.904.141.190	9.376.460.000
Tapanauli Tengah	5.460.846.090	5.738.320.510	6.032.212.590	6.348.241.230	6.678.155.650	7.024.150.000
Tapanauli Utara	4.642.325.790	4.869.478.210	5.070.194.850	5.280.688.780	5.510.190.100	5.764.940.000
Toba Samosir	4.355.422.460	4.551.510.880	4.767.984.660	5.001.922.470	5.250.302.060	5.505.260.000
Labuhanbatu	18.161.101.540	19.080.994.740	20.046.019.120	21.048.165.600	22.112.343.760	23.232.710.000
Dairi	5.153.826.260	5.413.748.650	5.688.450.920	5.968.774.080	6.267.821.650	6.569.810.000
Nias Selatan	3.356.389.090	3.505.189.390	3.659.767.510	3.826.617.280	4.018.741.070	4.221.040.000
Humbang Hasundutan	3.256.188.800	3.406.801.700	3.577.049.060	3.756.663.710	3.946.119.770	4.141.100.000
Pakpak Barat	639.390.240	677.432.920	717.891.170	760.552.530	805.008.990	852.300.000
Samosir	2.234.088.160	2.367.102.660	2.635.767.600	2.776.846.630	2.931.698.140	3.098.740.000
Padang Lawas	6.228.347.950	6.598.599.450	6.991.662.210	7.379.169.680	7.791.202.720	8.228.450.000
Labuhanbatu Selatan	14.546.121.720	15.294.507.410	16.088.420.180	16.907.586.050	17.797.948.820	18.750.160.000
Labuhanbatu Utara	13.414.526.550	14.109.369.190	14.843.994.450	15.602.046.160	16.413.325.810	17.259.190.000
Nias Utara	1.853.284.880	1.954.121.670	2.043.912.940	2.134.490.170	2.228.146.170	2.332.440.000
Nias Barat	973.757.080	1.024.925.930	1.074.476.480	1.126.194.810	1.175.929.810	1.236.730.000
Sibolga	2.757.268.360	2.913.174.020	3.063.071.630	3.224.576.760	3.393.914.150	3.570.330.000
Tanjungbalai	4.392.584.690	4.637.213.880	4.904.544.880	5.174.845.420	5.473.631.270	5.790.370.000
Pematangsiantar	7.594.428.820	7.992.371.110	8.380.773.270	8.750.152.850	9.170.185.700	9.611.740.000
Tebing Tinggi	3.084.172.070	3.235.299.890	3.400.749.170	3.575.505.220	3.760.504.520	3.954.030.000
Binjai	6.234.288.450	6.571.204.040	6.935.554.010	7.309.571.570	7.708.592.950	8.133.540.000
Padangsidempuan	3.287.386.650	3.454.242.550	3.636.872.390	3.830.321.640	4.038.933.410	4.261.320.000
Gunungsitoli	2.564.367.810	2.712.863.720	2.876.339.540	3.049.124.560	3.232.969.120	3.428.450.000
Total	123.222.788.220	129.688.225.940	136.582.994.600	143.573.567.080	151.039.537.830	158.906.290.000



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

Gambar 4.2

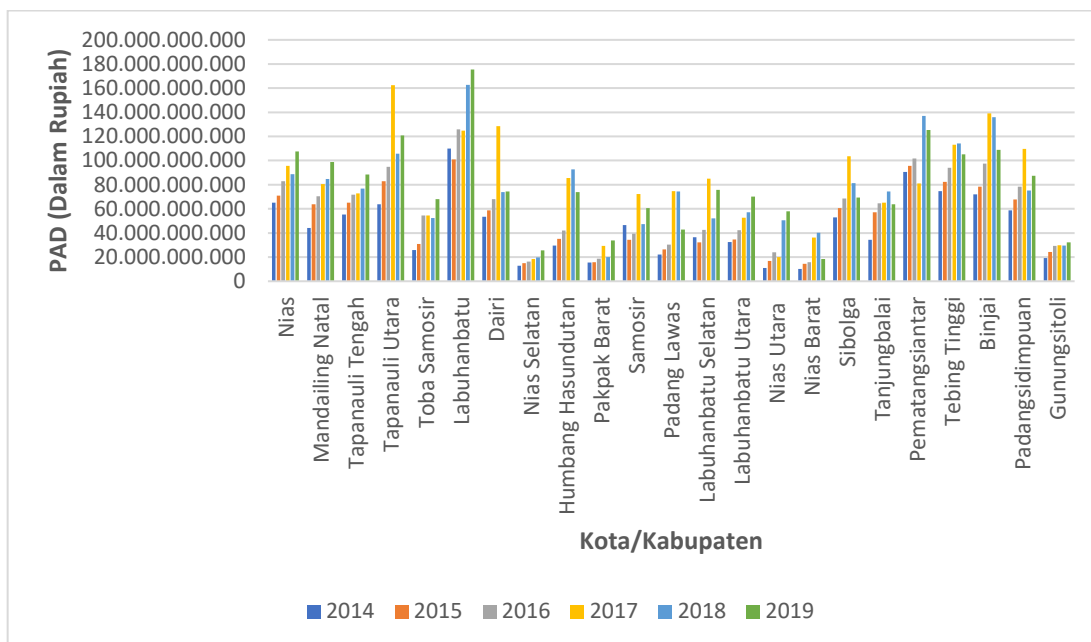
PDRB Kota/Kabupaten Sumata Utara 2014-2019

Kemudian pada gambar dan tabel PDRB terlihat bahwa pada tahun 2014-2019, berdasarkan *time series* PDRB tertinggi sebesar Rp 23.232.710.000.000 terdapat di Labuhanbatu pada tahun 2019, dan terendah sebesar Rp 639.390.240.000 terdapat di Pakpak Barat pada tahun 2014, sedangkan berdasarkan *cross section* PDRB tertinggi di seluruh 23 Kota/Kabupaten ada pada tahun 2019 sebesar Rp 158.906.290.000.000 dan terendah ada pada tahun 2014 sebesar Rp 123.222.788.220.000. Dilihat dari data tersebut Pertumbuhan Ekonomi pada daerah-daerah tersebut selalu meningkat.

Tabel 4.4

PAD Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019 (dalam Rupiah)

Kota/Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nias	65.082.210.000	70.892.624.000	82.840.434.000	95.726.168.000	88.754.606.000	107.629.139.000
Mandailing Natal	44.119.212.000	63.847.458.000	70.405.902.000	80.581.689.000	84.809.924.000	98.758.815.000
Tapanauli Tengah	55.364.392.000	65.224.735.000	71.758.982.000	72.710.309.000	76.660.883.000	88.441.123.000
Tapanauli Utara	63.696.097.000	82.861.214.000	94.783.155.000	162.441.906.000	105.656.763.000	120.736.498.000
Toba Samosir	25.924.591.000	30.986.265.000	54.391.304.000	54.480.824.000	52.298.961.000	68.042.531.000
Labuhanbatu	109.896.912.000	101.023.216.000	125.925.267.000	124.674.017.000	162.794.472.000	175.335.686.000
Dairi	53.525.854.000	58.791.848.000	68.003.242.000	128.489.751.000	73.906.825.000	74.360.339.000
Nias Selatan	12.828.006.000	15.037.045.000	16.262.467.000	18.450.267.000	19.605.735.000	25.664.884.000
Humbang Hasundutan	29.491.350.000	35.237.806.000	42.096.842.000	85.598.357.000	92.735.854.000	73.757.932.000
Pakpak Barat	15.388.658.000	15.880.335.000	18.748.806.000	29.320.487.000	20.061.208.000	33.915.958.000
Samosir	46.658.715.000	34.298.410.000	39.268.200.000	72.228.748.000	47.440.830.000	60.497.451.000
Padang Lawas	22.172.689.000	26.446.077.000	30.453.223.000	74.524.920.000	74.306.098.000	42.929.112.000
Labuhanbatu Selatan	36.386.788.000	32.302.333.000	42.507.928.000	84.964.451.000	52.209.769.000	75.687.648.000
Labuhanbatu Utara	32.398.504.000	34.499.899.000	42.296.116.000	52.690.086.000	57.010.691.000	70.122.563.000
Nias Utara	10.961.908.000	16.923.884.000	23.852.636.000	20.107.247.000	50.395.505.000	57.961.364.000
Nias Barat	10.298.059.000	14.492.750.000	15.711.121.000	36.239.997.000	40.193.008.000	18.411.236.000
Sibolga	52.922.967.000	60.486.786.000	68.537.903.000	103.672.204.000	81.245.734.000	69.311.245.000
Tanjungbalai	34.297.306.000	57.094.161.000	64.606.296.000	65.108.267.000	74.435.278.000	63.721.316.000
Pematangsiantar	90.477.498.000	95.557.865.000	101.581.324.000	81.112.898.000	137.052.839.000	125.343.187.000
Tebing Tinggi	74.515.273.000	82.410.054.000	94.058.492.000	113.222.875.000	114.048.354.000	105.239.919.000
Binjai	71.967.138.000	78.327.793.000	97.339.498.000	139.217.622.000	135.870.920.000	108.954.526.000
Padangsidempuan	58.725.450.000	67.730.739.000	78.417.754.000	109.650.318.000	75.063.576.000	87.432.087.000
Gunungsitoli	19.164.450.000	24.334.651.000	29.185.405.000	29.769.903.000	29.456.355.000	32.209.064.000
Total	1.036.264.027.000	1.164.687.948.000	1.373.032.297.000	1.834.983.311.000	1.746.014.188.000	1.784.463.623.000



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

Gambar 4.3

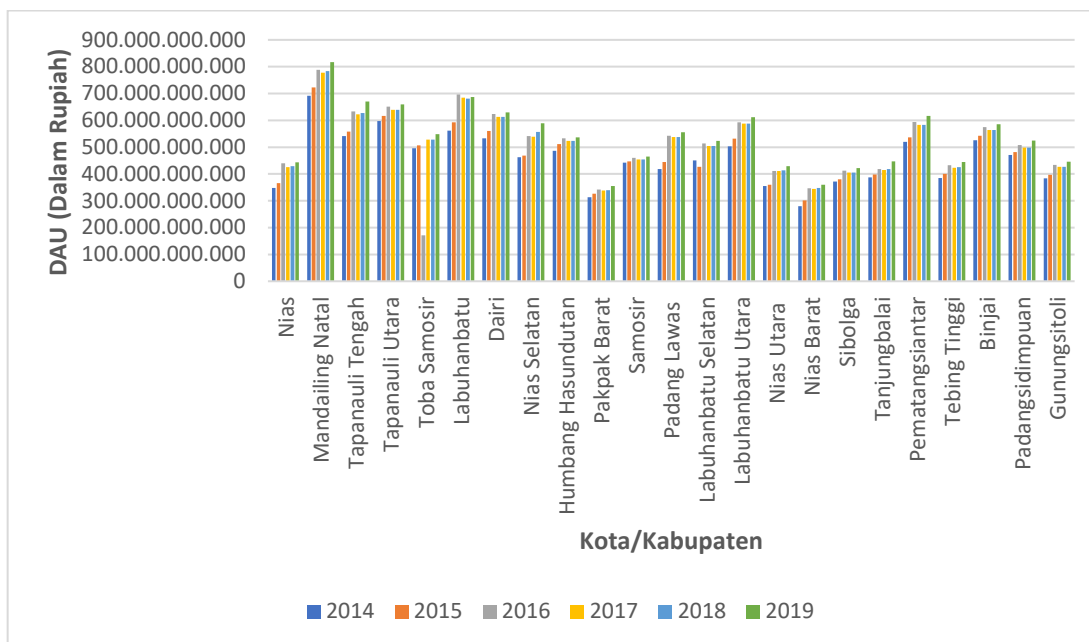
PAD Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019

Seiring dengan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan dalam menghasilkan PAD, berdasarkan *time series* nilai PAD tertinggi sebesar Rp 175.335.686.000 terdapat di Labuhanbatu pada tahun 2019, dan terendah sebesar Rp 10.298.059.000 terdapat di Nias Barat pada tahun 2014, sedangkan berdasarkan *cross section* PAD tertinggi di seluruh 23 Kota/Kabupaten ada pada tahun 2017 sebesar Rp 1.834.983.311.000 dan terendah ada pada tahun 2014 sebesar Rp 1.036.264.027.000.

Tabel 4.5

DAU Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014/2019 (dalam Rupiah)

Kota/Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nias	347.698.829.000	365.879.139.000	440.147.010.000	425.974.369.000	428.657.259.000	443.235.113.000
Mandailing Natal	692.133.576.000	722.942.098.000	788.477.434.000	777.487.741.000	783.200.132.000	816.400.130.000
Tapanuli Tengah	541.491.907.000	558.241.964.000	633.513.831.000	622.385.030.000	627.027.553.000	670.689.528.000
Tapanuli Utara	596.841.256.000	616.216.474.000	650.827.006.000	639.394.068.000	639.394.068.000	659.877.311.000
Toba Samosir	495.377.257.000	506.843.572.000	171.553.711.000	528.490.802.000	528.490.802.000	548.690.496.000
Labuhanbatu	561.476.208.000	593.025.840.000	696.646.309.000	684.408.474.000	680.408.474.000	686.644.553.000
Dairi	532.723.259.000	560.602.194.000	623.702.235.000	612.745.792.000	612.742.762.000	629.145.029.000
Nias Selatan	462.793.387.000	468.405.844.000	540.753.627.000	538.282.603.000	556.174.151.000	588.723.530.000
Humbang Hasundutan	486.879.858.000	511.805.111.000	533.184.787.000	523.818.445.000	523.818.445.000	536.163.886.000
Pakpak Barat	313.591.345.000	326.899.366.000	342.284.663.000	338.611.130.000	339.271.690.000	354.721.524.000
Samosir	441.619.455.000	447.470.935.000	459.549.788.000	453.737.230.000	453.737.230.000	465.249.052.000
Padang Lawas	418.726.923.000	444.806.362.000	542.199.556.000	537.469.609.000	537.455.568.000	554.953.633.000
Labuhanbatu Selatan	450.151.264.000	427.015.380.000	513.547.168.000	504.525.796.000	504.525.796.000	522.907.314.000
Labuhanbatu Utara	503.053.678.000	531.602.310.000	592.813.148.000	588.021.836.000	588.021.836.000	611.629.351.000
Nias Utara	355.354.627.000	359.841.943.000	410.931.632.000	411.036.299.000	413.338.900.000	429.134.187.000
Nias Barat	279.674.672.000	301.537.799.000	346.451.709.000	344.492.409.000	347.722.710.000	359.696.030.000
Sibolga	371.812.825.000	380.075.078.000	412.805.887.000	405.554.215.000	405.554.215.000	422.054.364.000
Tanjungbalai	387.259.055.000	398.405.838.000	418.170.504.000	415.172.063.000	418.666.416.000	446.820.629.000
Pematangsiantar	519.435.661.000	536.792.310.000	593.532.667.000	583.106.207.000	583.106.207.000	616.197.680.000
Tebing Tinggi	385.030.433.000	400.236.724.000	432.437.231.000	423.310.733.000	425.818.195.000	444.388.755.000
Binjai	526.069.678.000	541.895.577.000	574.469.158.000	564.377.582.000	564.377.582.000	585.637.664.000
Padangsidempuan	470.353.368.000	481.834.636.000	507.686.451.000	498.768.033.000	498.221.822.000	524.337.438.000
Gunungsitoli	383.524.614.000	397.362.423.000	434.259.520.000	426.630.977.000	426.758.929.000	446.102.654.000
Total	10.523.073.135.000	10.879.738.917.000	11.659.945.032.000	11.847.801.443.000	11.886.490.742.000	12.363.399.851.000



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

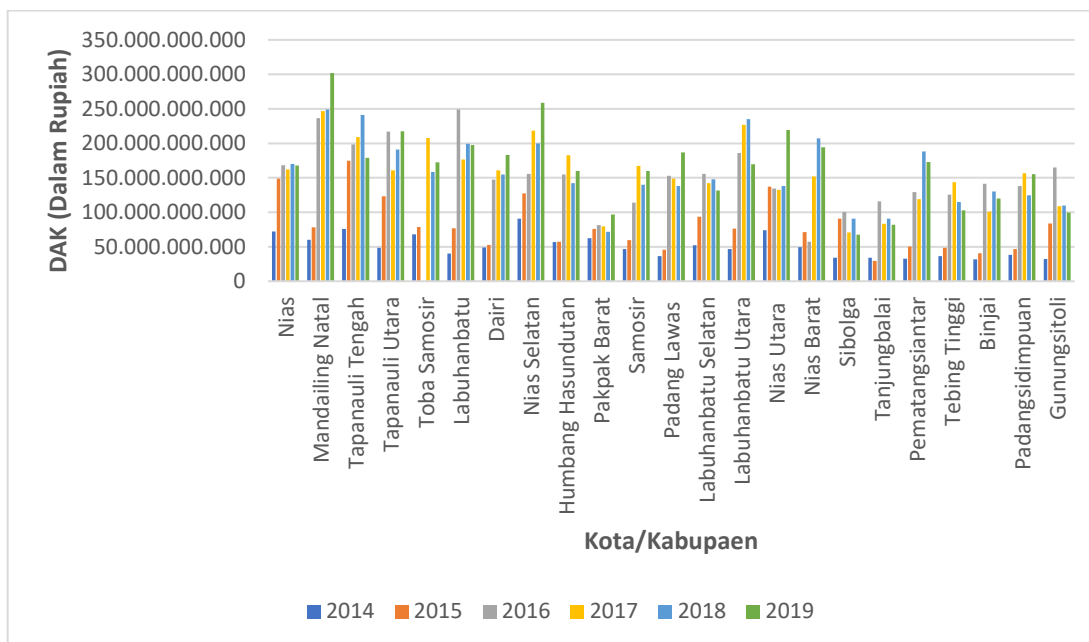
Gambar 4.4

DAU Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019

DAU bersumber dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk kemampuan keuangan daerah untuk mendanai anggaran untuk meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan daerah. Dapat dilihat bahwa persentase yang ada digambar tersebut DAU yang diterima 23 Kota/Kabupaten Sumatera Utara terlihat bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Sumatera Utara tergolong masih tinggi dikarenakan masih banyak Kota/Kabupaten yang tingkat penerimaan DAU-nya tinggi. Semakin besar penerimaan DAU yang merupakan sumber pendapatan daerah diharapkan dapat meningkatkan belanja modal di Sumatera Utara. Namun, dengan semakin tingginya DAU yang diterima pemerintah daerah, artinya bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masihlah tinggi. Dari tabel dan gambar diatas berdasarkan *time series* DAU tertinggi sebesar Rp 816.400.130.000 terdapat di Mandailing Natal pada tahun 2019, terendah sebesar Rp 171.553.711.000 terdapat di Toba Samosir pada tahun 2016, berdasarkan *cross section* DAU tertinggi di seluruh 23 Kota/Kabupaten ada pada tahun 2019 sebesar Rp 12.363.399.851.000 dan terendah ada pada tahun 2014 sebesar Rp 10.523.073.135.000.

Tabel 4.6
DAK Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019 (dalam Rupiah)

Kota/Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nias	72.092.260.000	148.939.010.000	168.440.788.000	162.194.939.000	170.260.750.000	167.986.948.000
Mandailing Natal	59.875.530.000	78.265.060.000	236.585.151.000	246.755.351.000	248.799.514.000	301.779.130.000
Tapanauli Tengah	75.689.840.000	174.579.680.000	198.187.850.000	209.061.015.000	241.018.513.000	178.925.114.000
Tapanauli Utara	48.316.860.000	123.348.680.000	217.153.190.000	160.718.193.000	191.102.620.000	217.540.917.000
Toba Samosir	67.784.130.000	78.487.330.000	-	207.841.807.000	158.583.010.000	172.432.388.000
Labuhanbatu	40.224.710.000	76.928.200.000	248.958.333.000	176.514.566.000	199.352.228.000	197.293.028.000
Dairi	48.992.230.000	52.697.240.000	147.231.283.000	160.824.790.000	154.914.774.000	182.980.495.000
Nias Selatan	90.900.704.000	127.206.270.000	155.744.384.000	218.308.382.000	199.651.553.000	258.903.689.000
Humbang Hasundutan	56.959.620.000	57.149.880.000	154.631.301.000	182.472.668.000	142.133.738.000	159.895.201.000
Pakpak Barat	62.184.950.000	75.644.960.000	81.437.072.000	79.655.950.000	71.532.319.000	96.835.290.000
Samosir	46.700.960.000	59.783.850.000	113.705.971.000	167.496.458.000	139.883.449.000	159.894.073.000
Padang Lawas	36.461.510.000	45.656.470.000	152.839.515.000	148.837.538.000	138.216.844.000	186.769.350.000
Labuhanbatu Selatan	52.260.820.000	93.295.670.000	155.867.360.000	142.379.982.000	147.933.111.000	131.522.369.000
Labuhanbatu Utara	46.487.070.000	76.482.700.000	185.996.231.000	226.696.697.000	235.115.494.000	169.410.066.000
Nias Utara	73.951.130.000	137.339.070.000	134.322.395.000	132.618.539.000	138.222.721.000	219.511.307.000
Nias Barat	49.384.690.000	71.201.600.000	57.230.941.000	152.138.174.000	207.417.409.000	194.289.160.000
Sibolga	33.880.280.000	90.670.040.000	100.575.079.000	70.813.424.000	90.935.128.000	67.329.016.000
Tanjungbalai	34.027.320.000	29.526.528.000	115.756.451.000	83.066.047.000	90.844.606.000	82.010.745.000
Pematangsiantar	32.662.570.000	50.467.450.000	129.325.770.000	119.183.584.000	188.366.544.000	172.707.214.000
Tebing Tinggi	36.231.720.000	48.429.780.000	125.558.944.000	143.607.096.000	114.868.858.000	102.896.356.000
Binjai	31.534.230.000	40.555.310.000	141.490.578.000	100.753.594.000	129.936.136.000	119.769.919.000
Padangsidempuan	38.329.260.000	46.804.080.000	138.084.975.000	156.530.353.000	124.683.309.000	155.239.107.000
Gunungsitoli	32.231.500.000	83.927.720.000	165.087.141.000	108.751.821.000	109.906.226.000	99.517.685.000
Total	1.167.163.894.000	1.867.386.578.000	3.324.210.703.000	3.557.220.968.000	3.633.678.854.000	3.795.438.567.000



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

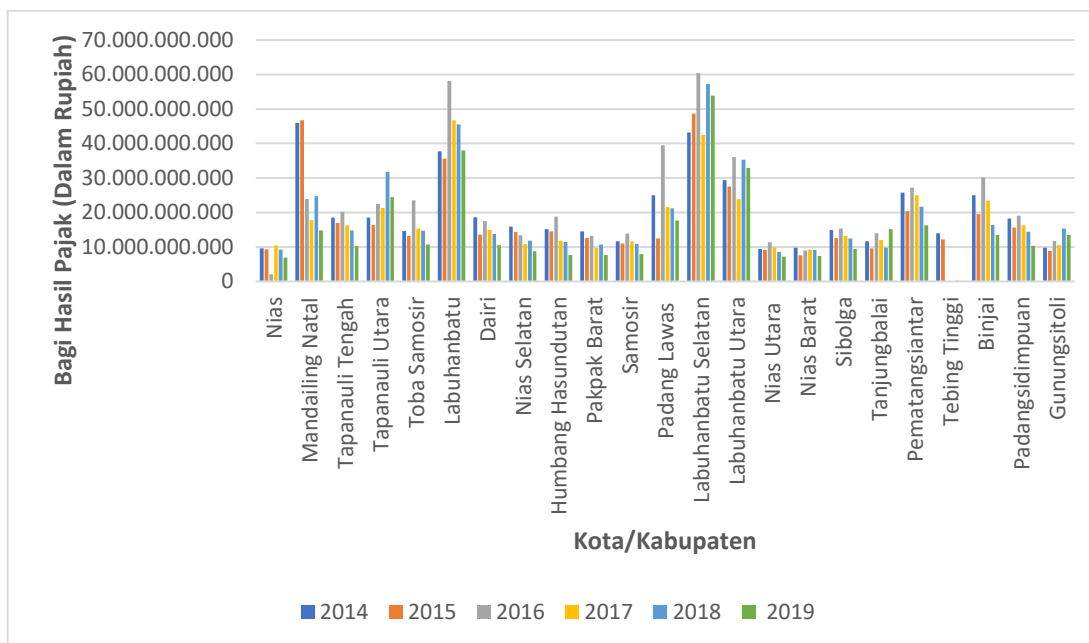
Gambar 4.5

DAK Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dilihat dari tabel dan gambar diatas berdasarkan *time series* DAK tertinggi sebesar Rp 301.779.130.000 terdapat di Mandailing Natal pada tahun 2019, dan terendah sebesar Rp 0 terdapat di Toba Samosir pada tahun 2016, sedangkan berdasarkan *cross section* DAK tertinggi di seluruh 23 Kota/Kabupaten ada pada tahun 2019 sebesar Rp 3.795.438.567.000 dan terendah ada pada tahun 2014 sebesar Rp 1.167.163.894.000.

Tabel 4.7
DBHP Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019 (dalam Rupiah)

Kota/Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nias	9.594.011.000	9.301.834.000	2.029.336.000	10.398.816.000	9.231.326.000	6.934.955.000
Mandailing Natal	45.957.386.000	46.681.933.000	23.880.921.000	17.778.360.000	24.728.710.000	14.786.090.000
Tapanauli Tengah	18.482.528.000	16.920.250.000	20.181.045.000	16.239.588.000	14.802.301.000	10.228.265.000
Tapanauli Utara	18.486.680.000	16.369.055.000	22.479.285.000	21.259.977.000	31.779.942.000	24.454.917.000
Toba Samosir	14.593.104.000	13.225.771.000	23.524.850.000	15.358.712.000	14.735.666.000	10.725.324.000
Labuhanbatu	37.690.160.000	35.585.445.000	58.151.702.000	46.728.995.000	45.481.438.000	38.027.498.000
Dairi	18.581.166.000	13.536.417.000	17.472.043.000	14.846.360.000	13.765.599.000	10.520.265.000
Nias Selatan	15.873.656.000	14.363.450.000	13.380.304.000	10.763.913.000	11.850.091.000	8.727.463.000
Humbang Hasundutan	15.134.499.000	14.507.909.000	18.750.050.000	11.833.162.000	11.487.984.000	7.619.727.000
Pakpak Barat	14.545.582.000	12.573.198.000	13.196.490.000	9.687.292.000	10.670.901.000	7.642.832.000
Samosir	11.669.728.000	10.943.516.000	13.892.687.000	11.619.792.000	10.855.233.000	7.906.318.000
Padang Lawas	25.006.548.000	12.509.311.000	39.501.475.000	21.610.873.000	21.207.960.000	17.625.484.000
Labuhanbatu Selatan	43.151.682.000	48.714.468.000	60.361.226.000	42.446.395.000	57.244.379.000	53.888.046.000
Labuhanbatu Utara	29.390.172.000	27.533.727.000	36.027.363.000	23.894.346.000	35.349.065.000	32.849.044.000
Nias Utara	9.382.711.000	9.117.697.000	11.397.924.000	9.900.184.000	8.589.289.000	7.153.324.000
Nias Barat	9.800.939.000	7.549.762.000	8.985.613.000	9.253.607.000	9.172.189.000	7.337.602.000
Sibolga	14.846.990.000	12.597.296.000	15.347.489.000	13.206.605.000	12.455.402.000	9.431.331.000
Tanjungbalai	11.669.020.000	9.617.465.000	13.947.609.000	11.960.863.000	9.794.139.000	15.127.078.000
Pematangsiantar	25.752.059.000	20.373.584.000	27.225.038.000	24.966.308.000	21.637.332.000	16.238.405.000
Tebing Tinggi	13.921.581.000	12.216.466.000	-	-	214.886.000	-
Binjai	25.037.451.000	19.563.488.000	30.240.669.000	23.399.167.000	16.365.563.000	13.449.290.000
Padangsidempuan	18.260.847.000	15.607.072.000	19.046.462.000	16.303.454.000	14.443.492.000	10.327.178.000
Gunungsitoli	9.796.041.000	8.879.950.000	11.745.196.000	10.539.890.000	15.374.623.000	13.474.485.000
Total	456.624.541.000	408.289.064.000	500.764.777.000	393.996.659.000	421.237.510.000	344.474.921.000



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

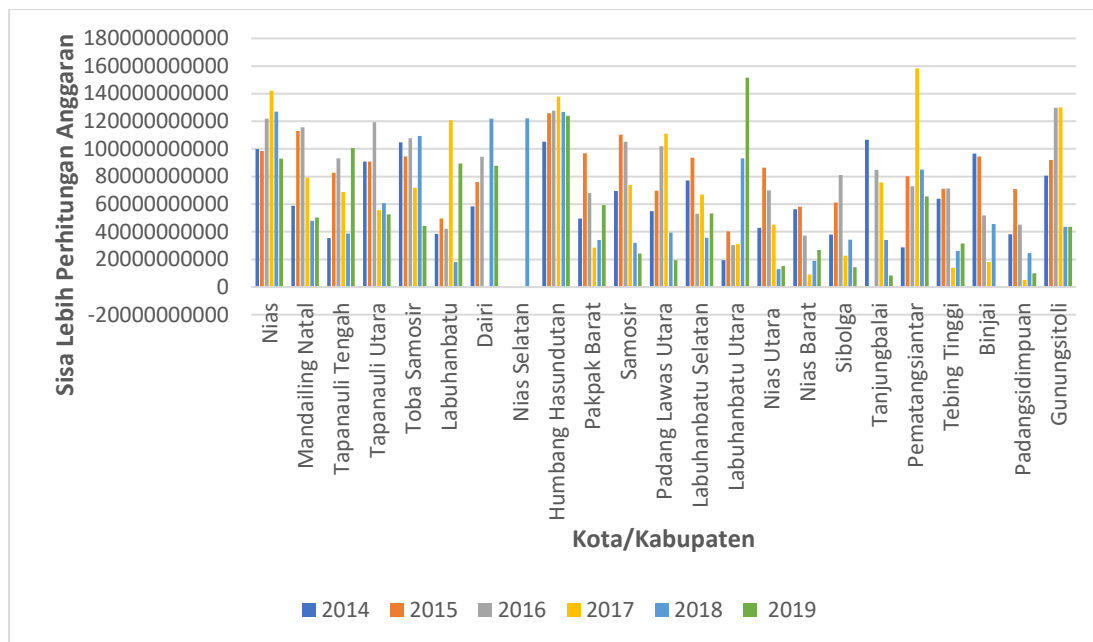
Gambar 4.6

DBHP Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan menurut prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Dilihat tabel dan gambar diatas merupakan DBHP Kota/Kabupaten Sumatera Utara, Berdasarkan *time series* DBHP tertinggi sebesar Rp 60.361.226.000 terdapat di Labuhanbatu selatan pada tahun 2016, sedangkan terendah sebesar Rp 0 terdapat di Tebingtinggi pada tahun 2016,2017, dan 2019, dan berdasarkan *cross section* DBHP tertinggi di seluruh 23 Kota/Kabupaten ada pada tahun 2016 sebesar Rp 500.764.777.000 dan terendah ada pada tahun 2019 sebesar Rp 344.474.921.000.

Tabel 4.8
SiLPA Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019 (dalam Rupiah)

Kota/Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nias	99.953.320.000	98.535.070.000	121.868.448.000	142.119.954.000	126.994.668.000	92.818.155.000
Mandailing Natal	58.792.574.000	113.192.965.000	115.712.802.000	79.253.757.000	48.009.470.000	503.93.780.000
Tapanauli Tengah	35.344.986.000	82.706.685.000	93.198.803.000	68.928.299.000	38.653.948.000	100.578.045.000
Tapanauli Utara	90.786.681.000	90.786.681.000	119.289.789.000	55.710.585.000	60.633.555.000	52.582.578.000
Toba Samosir	104.676.895.000	94.600.740.000	107.759.722.000	71.742.316.000	109.466.370.000	44.265.305.000
Labuhanbatu	38.573.108.000	49.495.795.000	42.286.025.000	120.847.379.000	18.127.094.000	89.443.727.000
Dairi	58.301.894.000	75.920.335.000	94.271.906.000	0	121.851.799.000	87.947.135.000
Nias Selatan	0	0	-64.357	0	122.133.136.000	0
Humbang Hasundutan	105.102.117.000	125.726.854.000	127.692.276.000	137.823.895.000	126.725.260.000	123.920.936.000
Pakpak Barat	49.573.062.000	96.832.632.000	68.032.683.000	28.569.119.000	34.028.904.000	59.238.031.000
Samosir	69.530.390.000	110.279.334.000	105.233.312.000	73.916.691.000	32.001.197.000	24.437.136.000
Padang Lawas	55.027.384.000	69.857.925.000	102.035.764.000	111.118.710.000	39.413.288.000	19.443.461.000
Labuhanbatu Selatan	77.127.897.000	93.686.742.000	53.026.126.000	67.084.088.000	35.798.687.000	53.344.591.000
Labuhanbatu Utara	19.487.993.000	40.243.052.000	30.254.220.000	31.057.098.000	93.063.305.000	151.493.300.000
Nias Utara	42.835.324.000	86.439.106.000	69.881.780.000	45.147.533.000	12.992.728.000	15.351.561.000
Nias Barat	56.254.009.000	58.260.195.000	37.343.899.000	8.923.650.000	19.015.220.000	26.903.993.000
Sibolga	38.018.367.000	61.289.803.000	81.182.196.000	22.791.905.000	34.207.055.000	14.380.700.000
Tanjungbalai	106.652.106.000	0	84.808.082.000	75.891.822.000	34.087.903.000	8.414.529.000
Pematangsiantar	28.838.785.000	80.178.361.000	72.961.236.000	158.256.061.000	85.004.454.000	65.649.919.000
Tebing Tinggi	64.028.560.000	71.134.638.000	71.414.918.000	13.868.964.000	26.226.140.000	31.596.840.000
Binjai	96.674.842.000	94.526.640.000	51.993.127.000	18.163.185.000	45.604.997.000	0
Padangsidempuan	38.250.611.000	70.866.284.000	45.111.413.000	5.194.712.000	24.510.929.000	9.962.329.000
Gunungsitoli	80.717.612.000	92.056.238.000	129.864.892.000	130.087.095.000	43.505.020.000	43.507.716.000
Total	1.414.548.517.000	1.756.616.075.000	1.825.223.354.643	1.466.496.818.000	1.332.055.127.000	1.165.673.767.000



Gambar 4.7

SiLPA Kota/Kabupaten Sumatera Utara 2014-2019

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berdasarkan *time series* SiLPA tertinggi sebesar Rp 158.256.061.000 terdapat di Pematangsiantar pada tahun 2017, SiLPA terendah sebesar - Rp 64.357 terdapat di Nias Selatan pada tahun 2016 dan berdasarkan cross section SiLPA tertinggi di seluruh 23 Kota/Kabupaten ada pada tahun 2016 sebesar Rp 1.825.223.354.643.

4.2. Analisis Data

Pengujian mengenai penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal” dilakukan dengan pengujian statistik. Penelitian ini menggunakan *software* Eviews 9. Metode yang digunakan adalah analisis Regresi Data Panel.

Beberapa pengujian dilakukan yaitu Uji Regresi Data Panel dan Uji Hipotesis (uji t atau koefisien secara parsial, uji F atau koefisien secara bersama-sama, dan uji koefisien Determinasi).

4.2.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel dalam penelitian disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.	Obs
BM	187.584.328.500	294.626.135.000	81.569.259.000	46642129703.7584	138
PDRB	4.594.362.380.000	23.232.710.000.000	639.390.240.000	4993073808728.94	138
PAD	64.844.253.000	175.335.686.000	10.298.059.000	35490364651.5168	138
DAU	504.525.796.000	816.400.130.000	171.533.711.000	113626405609.230	138
DAK	129.630.953.000	301.779.130.000	0	62713272467.6909	138
DBHP	14.569.343.000	60.361.226.000	0	12162912754.7453	138
SiLPA	64.839.239.500	158.256.061.000	-64.357	38695458372.1093	138

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 9 (2021)

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 23 sampel dengan periode penelitian 6 tahun maka memperoleh *Observations* (n) = 138.

- Diketahui bahwa nilai Belanja Modal (Y) memiliki nilai median sebesar Rp 187.584.328.500, nilai maksimum sebesar Rp 294.626.135.000 terdapat di Labuhanbatu Selatan pada tahun 2016, nilai minimum sebesar Rp 81.569.259.000 terdapat di Sibolga Pada tahun 2019, dan nilai Std. Dev. 46642129703,7584.
- Diketahui bahwa nilai PDRB (X1) memiliki nilai median sebesar Rp 4.594.362.380.000, nilai maksimum sebesar Rp 23.232.710.000.000 terdapat di Labuhanbatu pada tahun 2019, nilai minimum sebesar Rp 639.390.240.000 terdapat di Pakpak Barat pada tahun 2014, dan nilai Std. Dev. 4993073808728,94.
- Diketahui bahwa nilai PAD (X2) memiliki nilai median sebesar Rp 64.844.253.000, nilai maksimum sebesar Rp 175.335.686.000 terdapat di Labuhanbatu pada tahun 2019, nilai minimum sebesar Rp 10.298.059.000 terdapat di Nias Barat pada tahun 2014, dan nilai Std. Dev. 35490364651,5168.
- Diketahui bahwa nilai DAU (X3) memiliki nilai median sebesar Rp 504.525.796.000, nilai maksimum sebesar Rp 816.400.130.000 terdapat di Mandailing Natal pada tahun 2019, nilai minimum sebesar Rp 171.533.711.000 terdapat di Toba Samosir pada tahun 2016 dan nilai Std. Dev. 113625982120,254.
- Diketahui bahwa nilai DAK (X4) memiliki nilai median sebesar Rp 129.630.953.000, nilai maksimum sebesar Rp 301.779.130.000 terdapat di Mandailing Natal pada tahun 2019, nilai minimum sebesar Rp 0 terdapat di Toba Samosir pada tahun 2016 dan nilai Std. Dev. 62713272467,6909.

- f) Diketahui Bahwa nilai DBHP (X5) memiliki nilai median sebesar Rp 14.569.343.000, nilai maksimum sebesar Rp 60.361.226.000 terdapat di Labuhanbatu selatan pada tahun 2016, nilai minimum sebesar Rp 0 terdapat di Tebingtinggi pada tahun 2016,2017, dan 2019, dan nilai Std. Dev 12162912754,7453.
- g) Diketahui Bahwa nilai SiLPA (X6) memiliki nilai median sebesar Rp 64.839.239.500, nilai maksimum sebesar Rp 158.256.061.000 terdapat di Pematangsiantar pada tahun 2017, nilai minimum sebesar - Rp 64.357 terdapat di Nias Selatan pada tahun 2016 dan nilai Std. Dev 38695458372.1093.

4.2.2 Uji Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam metode regresi data panel terdapat tiga buah pilihan model yang dapat digunakan yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Ketiga model ini memiliki kriteria yang berbeda-beda dan peneliti harus dapat memilih model mana yang paling tepat berdasarkan data penelitian yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, dibutuhkan tiga macam pengujian untuk menentukan model mana yang paling tepat yang dapat digunakan peneliti. Ketiga uji tersebut adalah Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier*. Jika dua dari tiga pengujian ini menemukan model yang sama, maka model tersebut yang cocok untuk peneliti.

4.2.2.1. Uji *Chow*

Uji *Chow* digunakan untuk menentukan apakah model yang paling cocok, yaitu Model *Common Effect* atau Model *Fixed Effect*. Jika kesimpulan diterima H_0 maka pilih Model *Common Effect*, jika kesimpulan diterima H_1 maka pilih Model *Fixed Effect*. Hasil pengujian model menggunakan uji *Chow* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.518344	(22,109)	0.0000
Cross-section Chi-square	74.046122	22	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 9 (2021)

Nilai distribusi statistik dari chi-square pada tabel tersebut, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Eviews 9 menunjukkan bahwa probabilitas F dalam uji *Chow* pada Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendaparan Asli Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3), Dana Alokasi Khusus (X4), Dana Bagi Hasil Pajak (X5), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X6) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka secara statistik H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect*. Setelah

itu, perlu dilakukan pengujian lagi yaitu uji *Hausman* untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

4.2.2.2. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan apakah model yang paling cocok, yaitu Model *Fixed Effect* atau Model *Random Effect*. Jika kesimpulan diterima H_0 maka pilih *Random Effect*, jika kesimpulan diterima H_1 maka pilih Model *Fixed Effect*. Hasil pengujian model menggunakan uji *Hausman* dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.698112	6	0.0047

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 9 (2021)

Pada tabel diatas diperoleh probabilitas dalam uji *Hausman* pada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendaparan Asli Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3), Dana Alokasi Khusus (X4), Dana Bagi Hasil Pajak (X5), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X6) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,0047 Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai probabilitas $< 0,05$, sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu model yang tepat digunakan adalah Model *Fixed Effect* karena H_1 diterima.

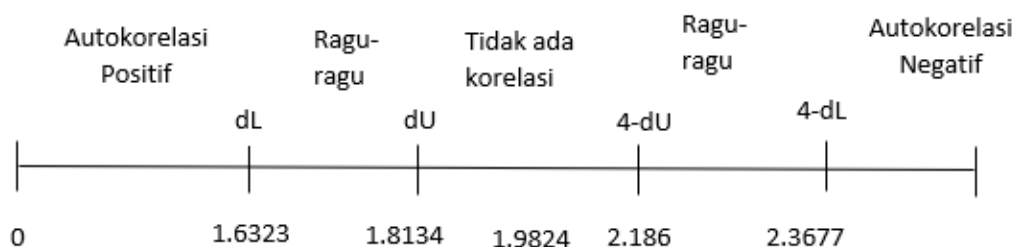
Hasil Uji Chow dan Uji *Hausman* menunjukkan bahwa model yang paling tepat adalah Model *Fixed Effect* maka dari itu tidak perlu dilakukan lagi Uji *lagrange Multiplier*.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Karena hasil model yang didapatkan adalah *Fixed Effect*, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Menurut Gujarati dan Porter sangat kecil kemungkinan terjadi multikolinearitas pada data panel sehingga peneliti cukup melakukan uji autokorelasi dan uji heterokedastis.

4.2.3.1 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi dapat diketahui melalui Uji Durbin-Watson (*D-W Test*), adalah pengujian yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya korelasi serial dalam model regresi atau untuk mengetahui apakah di dalam model yang digunakan terdapat autokorelasi diantara variabel-variabel yang diamati. Jika DW statistik berada diantara $du < d < 4 - du$, maka model regresi dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi yang dilakukan di dalam penelitian ini.



Gambar 4.8

Skema Autokorelasi

Berdasarkan gambar 4.8 dari hasil estimasi didapat nilai DW statistik sebesar 1,9824 pada seluruh populasi, dan jumlah variabel bebas didapat nilai dU sebesar 1,8134, dL sebesar 1,6323, 4-dU sebesar 2,186, dan 4-dL sebesar 2,677. Dengan melihat DW statistiknya maka tidak terdapat autokorelasi.

4.2.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Jika nilai probabilitas dari masing-masing variabel $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terdapat heteroskedastis pada model tersebut atau hasilnya data dalam kondisi homoskedastis. Sebaliknya, koefisien korelasi $< 0,05$ maka model terjadi heterokedastisitas. Berikut hasil uji autokorelasi yang dilakukan di dalam penelitian ini.

Tabel 4.12

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	t-Statistic	Prob.
C	2.171687	0.0320
PDRB	0.337410	0.7365
PAD	0.705059	0.4823
DAU	-1.601966	0.1121
DAK	0.486831	0.6274
DBHP	-0.521047	0.6034
SILPA	-1.094735	0.2760

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 9 (2021)

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji glejser terlihat bahwa nilai Prob. dari masing-masing variabel independen lebih besar dari alpha (0,05) sehingga dapat disimpulkan pada persamaan dalam model ini tidak ada gejala atau tidak terjadi heterokedastisitas.

4.2.4 Analisis Regresi

Dalam melakukan suatu pengamatan terhadap sebuah fenomena atau peristiwa, tidak cukup hanya melakukan pengamatan terhadap unit-unit amatan dalam satu waktu tertentu saja, tetapi juga mengamati unit-unit tersebut pada berbagai periode waktu. Analisis regresi data panel adalah salah satu pendekatan pemodelan yang mengikutsertakan pengaruh waktu tersebut ke dalam model. Selain itu, pemodelan data panel secara umum akan memberikan informasi yang lebih informatif dibandingkan pemodelan yang hanya menggunakan data lintas individu (*cross section*) atau data deret waktu (*time series*) saja. Data panel sendiri merupakan data gabungan antara datalintas individu dan deret waktu (Kosmaryati dkk., 2019).

Hasil regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13

Hasil Regresi Panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error
C	237516920463.959	42989531459.73071
PDRB	-0.017597	0.005219
PAD	0.322757	0.197813
DAU	-0.110364	0.087742
DAK	0.449489	0.077842
DBHP	0.318391	0.505332
SiLPA	0.477865	0.081295

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 9 (2021)

Berdasarkan pengolahan data panel dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) pada tabel di atas diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$BM(Y) = \alpha_{it} + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DAK_{it} + \beta_5 DBHP_{it} + \epsilon_{it}$$

$$BM(Y) = 237516920463,959 - 0,017597 PDRB + 0,322757 PAD - 0,110364 DAU + 0,449489 DAK + 0,318391 DBHP + 0,477865 SiLPA + \epsilon_{it}$$

Konstanta (α) bernilai positif mengindikasikan mengindikasikan bahwa variabel bebas dianggap semuanya tetap maka Belanja Modal meningkat sebesar 237516920463,959, jika PDRB mengalami penurunan satu satuan maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,017597, jika PAD mengalami kenaikan satu satuan maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,322757, jika DAU mengalami penurunan satu satuan maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,110364, jika DAK mengalami kenaikan satu satuan maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,449489, jika DBHP mengalami kenaikan satu satuan maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,318391, dan jika SiLPA mengalami kenaikan satu satuan maka Belanja Modal meningkat sebesar 0,477865.

4.2.5. Pengujian Hipotesis

4.2.5.1. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (PDRB, PAD, DAU, DAK, DBHP, dan SiLPA) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal. Uji t digunakan untuk melihat sejauh mana signifikansi pengaruh dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat dan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian dapat diterima atau ditolak.

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dikatakan signifikan dan hipotesis dapat diterima apabila nilai probabilitas $t < 0,05$. Hasil dari pengujian Uji-t statistik sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	237516920463.959	42989531459.73071	5.524994	0.0000
PDRB	-0.017597	0.005219	-3.371867	0.0010
PAD	0.322757	0.197813	1.631627	0.1056
DAU	-0.110364	0.087742	-1.257827	0.2111
DAK	0.449489	0.077842	5.774407	0.0000
DBHP	0.318391	0.505332	0.630063	0.5300
SiLPA	0.477865	0.081295	5.878154	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 9 (2021)

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Terhadap Belanja Modal

Untuk menguji kebenaran bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019 dari hasil perhitungan analisis data panel untuk variabel PDRB, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,017597 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0010. nilai probabilitas t lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Maka H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal.

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Untuk menguji kebenaran bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019 dari hasil perhitungan analisis data panel untuk variabel PAD, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,322757 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1056. nilai probabilitas t lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Maka H2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

c. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Untuk menguji kebenaran bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Periode Tahun 2014-2019 di Sumatera Utara dari hasil perhitungan analisis data panel untuk variabel PAD, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,110364 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2111. nilai probabilitas t lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Maka H3 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

d. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Untuk menguji kebenaran bahwa DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Periode Tahun 2014-2019 di Sumatera Utara dari hasil perhitungan analisis data panel untuk variabel DAK, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,449489 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. nilai probabilitas t lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Maka H4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal.

e. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Modal

Untuk menguji kebenaran bahwa DBHP berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Periode Tahun 2014-2019 di Sumatera Utara dari hasil perhitungan analisis data panel untuk variabel DBHP, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,318391 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5300. nilai probabilitas t lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Maka H5 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa DBHP tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

f. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Untuk menguji kebenaran bahwa SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten Periode Tahun 2014-2019 di Sumatera Utara dari hasil perhitungan analisis data panel untuk variabel SiLPA, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,477865 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. nilai probabilitas t lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Maka H6 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.2.5.2. Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 4.15

Hasil Uji F

F-statistic	9.652142
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 9 (2021)

Berdasarkan analisis data panel dengan menggunakan *software* Eviews 9, diperoleh nilai F Hitung sebesar 9,652142 dengan probabilitas sebesar $0.000000 < 0.05$. Nilai probabilitas F lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Maka H₀ diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. variabel PDRB, PAD, DAU, DAK, DBHP, SiLPA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kab di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.

4.2.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen. Nilai determinasi R^2 mengandung kelemahan di mana adanya kemungkinan terjadinya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Hasil uji determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.16

Hasil Uji R^2

R-squared	0.712598
Adjusted R-squared	0.638770

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 9 (2021)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,712598. besarnya angka koefisien determinasi sebesar 0,712598 sama dengan 71,25%. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 71,25%. Sisanya 28,75% dijelaskan oleh variabel atau faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini. Yaitu di mana faktor-faktor tersebut diantaranya, Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam, Luas Wilayah Daerah.

4.3 Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh peneliti pada dua puluh tiga Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2014-2019 yang menggunakan Eviews 9 tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Belanja Modal, yaitu PDRB, PAD, DAU, DAK, DBHP, dan SiLPA maka peneliti menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian.

4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan diperoleh hasil PDRB (X1) dengan nilai koefisien sebesar -0,017597 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0010. nilai probabilitas t lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05, maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal atau hipotesis diterima.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Dengan begitu makin tingginya Pertumbuhan Ekonomi makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu Pertumbuhan Ekonomi daerah. Biasanya bila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus mengalokasikan alokasi Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi tahun anggaran. Dengan demikian ini menjadi pemicu bagi para investor domestik/asing untuk menanamkan modalnya pada tanah, peralatan fisik, dan infrastruktur pemerintah daerah, Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mayasari, Sinarwati, dan Yuniarta (2014) yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal dan berbeda dengan penelitian Permana dan Rahardjo (2013), Sari, Kepramareni dan Novitasari (2017) dan Mundiroh (2019) yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan diperoleh hasil PAD (X2) dengan nilai koefisien sebesar 0,322747 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1056. nilai probabilitas t lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05 maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal atau hipotesis ditolak.

Hal ini berarti bahwa perkembangan belanja modal belum bisa dipengaruhi oleh perkembangan pendapatan asli daerah yang terealisasi di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019, Menurut Yovita dalam penelitian Adyatma dan Oktaviani (2016) Provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar cenderung tidak memiliki Belanja Modal yang besar. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ndede, Sondakh, dan Pontoh (2016) dan Adyatma dan Oktaviani (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, berbeda dengan penelitian Meianto, Betry, dan Whenny (2013), Permana dan Rahardjo (2013),

Mayasari Sinarwati, dan Yuniarta (2014), Sari, Kepramareni, dan Novitasari (2017), Rifai (2017), Aditya, dan Maryono (2018), Cahyaning (2018), Mandani (2019), Mundiroh (2019), dan Imamah (2020) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan diperoleh hasil DAU (X3) diperoleh nilai koefisien sebesar -0,110364 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2111. nilai probabilitas t lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05, maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal atau hipotesis ditolak.

Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dikarenakan dana alokasi umum yang selama ini diterima daerah-daerah di Sumatera Utara tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja modal. DAU bersifat "*Block Grant*", memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Meianto, Betry dan Whenny (2013) dan Sari, Kepramareni dan Novitasari (2017), dan Imamah (2020) yang menyatakan Bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, berbeda dengan penelitian Permana dan Rahardjo (2013), Mayasari, Sinarwati, dan Yuniarta (2014), Adyatma dan Oktaviani (2016), Rifai (2017), Aditya, dan Maryono (2018), Cahyaning (2018), Mandani (2019), Mundiroh (2019) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.3.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan diperoleh hasil DAK (X4) diperoleh nilai koefisien sebesar 0,449489 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. nilai probabilitas t lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05, maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal atau hipotesis diterima.

DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggungjawab dan akuntabilitas bagi pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana

dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ndede, Sondakh, dan Pontoh (2016), Rifai (2017), Aditya, dan Maryono (2018), Mandani (2019), dan Imamah (2020) yang menyatakan DAK berpengaruh terhadap belanja modal, berbeda dengan penelitian Meianto, Betry, dan Whenny (2013), Permana dan Rahardjo (2013), Sari, Kepramareni, dan Novitasari (2017) yang menyatakan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.3.5 Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan diperoleh hasil DBHP (X5) diperoleh nilai koefisien sebesar 0,318391 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5300. nilai probabilitas t lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05, maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa DBHP tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa DBHP berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal atau hipotesis ditolak.

Hal ini dikarenakan sumber dana bagi hasil yaitu sumber daya alam dan pajak mengalami fluktuasi tiap tahunnya, sehingga dana bagi hasil pajak tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal yang di anggarkan pada belanja modal di Sumatera Utara dan belum dapat memberikan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Belanja modal lebih cenderung dipengaruhi oleh PDRB, DAK dan SiLPA serta jumlah penerimaan DBHP yang relatif kecil jika dibandingkan dengan penerimaan lainnya membuat pengaruh DBHP terhadap Belanja Modal menjadi tidak berpengaruh. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lukha (2013) yang menyatakan DBHP berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.3.6 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan diperoleh hasil SiLPA (X6) diperoleh nilai koefisien sebesar 0,477865 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. nilai probabilitas t lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05, maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal atau hipotesis diterima.

SiLPA hanya terbentuk bila terjadi surplus dalam APBD dan terjadi Pembiayaan Neto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan, SiLPA akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja serta mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dan mendanai kewajiban lainnya yang

sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran juga merupakan sumber pendanaan untuk membiayai Belanja Modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Djuanda dan Sarwani (2018), dan Imamah (2020).

4.3.7 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan diperoleh nilai F Hitung sebesar 11,43756 dengan probabilitas sebesar $0,000000 < 0,05$. Nilai probabilitas F lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. variabel PDRB, PAD, DAU, DAK, DBHP, SiLPA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kab di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.

Hal ini mengindikasikan bahwa naik dan turunnya Alokasi Belanja Modal yang diperoleh oleh Kota/Kabupaten dipengaruhi oleh naik dan turunnya Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang dimiliki oleh Kota/Kabupaten. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Tabel 4.17
Hasil Hipotesis Penelitian

Kode	Hipotesis	Hasil
H1	PDRB berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.	Diterima
H2	PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.	Ditolak
H3	DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.	Ditolak
H4	DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.	Diterima

Kode	Hipotesis	Hasil
H5	DBHP berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.	Ditolak
H6	SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.	Diterima
H7	PDRB, PAD, DAU, DAK, DBHP, dan SiLPA berpengaruh simultan terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019.	Diterima

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PDRB, DAK dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan PAD, DAU, dan DBHP tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Periode tahun 2014-2019.
2. PDRB, PAD, DAU, DAK, DBHP, dan SiLPA secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara 2014-2019.
3. Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,712598. besarnya angka koefisien determinasi sebesar 0,712598 sama dengan 71,25%. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 71,25%. Sisanya 28,75% dijelaskan oleh variabel atau faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini. Yaitu di mana faktor-faktor tersebut diantaranya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu, Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam dan Luas Wilayah Daerah.

5.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen lain yang digunakan untuk menambah penerimaan daerah seperti Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, dan lainnya.
2. Bagi Pemerintah Daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal. Bagi Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara diharapkan terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga pendapatan daerah meningkat dari tahun ke tahun dan alokasi Belanja Modal juga semakin meningkat serta tercipta kemandirian daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengelola dengan baik Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat agar lebih mengutamakan pengalokasian ke Belanja Modal.
3. Bagi Pemerintah Pusat, hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi masukan kepada pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara.

4. Bagi Dirjen Pajak, Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi masukan terhadap Direktorat Jenderal Pajak atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) dan diharapkan agar lebih dapat melakukan pengawasan terhadap dana pengelolaan bagi hasil pajak dan harus diperketat lagi oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga bagi hasil pajak dapat dialokasikan dengan benar dan dapat lebih meningkatkan Belanja Modal.
5. Bagi Masyarakat Umum, hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi informasi terhadap masyarakat berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013) 'Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah', Cetakan Pertama, p. 4.
- Aditya, Dina Mei Eka dan Maryono (2018) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi)', *Prosiding SENDI_U 2018*, (33), pp. 631–639.
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Kota Bitung 2003-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 190–205.
- Arina, M. M., Koleangan, R. A. M. dan Engka, D. S. M. (2019) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado', *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), pp. 1–11. doi: 10.35794/jpekd.23451.20.01.2019.
- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Bastian, I. (2006). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Basuki, A. T. (2016) 'Panduan Regresi Data Panel', Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2009).
- Boediono. 2010. Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?, Kumpulan Esai Ekonomi. Jakarta: Keputakaan Populer Gramedia.
- Cahyaning, S. (2018) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015', *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(1), pp. 1–38. doi: 10.20473/jiet.v3i1.7874.
- Dalil, A., Sukidin, S. dan Hartanto, W. (2020) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018', *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 14(1), p. 178. doi: 10.19184/jpe.v14i1.12598.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007.

- Gerungan, H. P., Paul, D., Saerang, E., Ilat Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Belanja Modal. V., Akuntansi, P. M., Ekonomi, F., & Sam, U. (n.d.). 1, 2, 3. 1, 233–245.
- Imamah, Nur. 2020. Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Kosmaryati, et al. (2019) ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel’, Indonesian Journal of Applied Statistics, 2(1), p. 10. doi: 10.13057/ijas.v2i1.27932.
- Laranga, R. N. dkk (2017). Pendapatan, P., Daerah, A., Alokasi, D., Dana, D. A. N., Hasil, B., Bukan, P., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun (2004 – 2013). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 17(01), 218–229. Pendapatan, P. et al. (no date) ‘1, 2, 3’, (1), pp. 233–245.
- Lukha, Dinda Anggita (2013) Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Di Sumatera Utara. Undergraduate thesis, UNIMED.
- Maharani, N. R., Husaini, A. dan Sunarti (2017) ‘Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008-2013)’, *Bagi Hasil Pajak*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Mandani, P. S., (2019). Umum, A., Dana, D. A. N., & Khusus, A. S. (Studi pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Jawa Timur). IAIN Tulungagung.
- Mayasari, L. P. R., Sinarwati, N. K. dan Yuniarta, G. A. (2014) ‘Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng’, e-Journal S1 Ak Universitas Ganesha, 2(1), p. 11.
- Meianto, E., Betri dan Wenny, C. D. (2013) ‘Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan’, pp. 1–13.
- Mundiroh, S. (2019) ‘Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah’, *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), p. 104. doi: 10.32493/jabi.v2i1.y2019.p104-122.

- Ndede, Y., Sondakh, J. J., & Pontoh, W. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Anggaran Belanja Modal Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(03), 586–595.
- Nofrizal, E., Haq, A., & Surono, S. E. (2017). Pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015. *E-Journal*.
- Pamuji, W. dan Abdillah, W. (2012) ‘Pendapatan Asli Daerah , Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak , Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat INFO ARTIKEL’, *Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 1(2), pp. 149–159.
- Pangestika, S. (2015) ‘Analisis Estimasi Model Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (Cem), Fixed Effect Model (Fem), dan Random Effect Model (Rem)’, *Unnes Journal*, 2(1), p. 106.
- Permana, D. Y., & Rahardjo, S. N. (2013). Umum, A., Dana, D. A. N., Khusus, A., Pengalokasian, T., (Studi pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah). 2, 1–10.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Reupblik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Tentang Pajak Daerah.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rifai, R. A. (2017) ‘Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsisulawesi Tengah’, *E-Journal Katalogis*, 5(7), pp. 169–180.
- Rosyid, M. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(5), 68–80.
- Sari, D. G. Y. A., Kepramareni, P., & Novitasari, N. L. G. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal

Kabupaten/Kota Se-Bali. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 9(1), 15-29.
<https://doi.org/10.22225/kr.9.1.325.15-29>

Sari, N., Djuanda, G., & Sarwani, S. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 91–100. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.92>

Satria, D. (2011) ‘Analisis Regresi Model Data Panel’, pp. 1–15. Available at: <http://www.diassatria.com/wp-content/uploads/2018/05/Modul-PanelData-Eviews.pdf>.

Singagerda, F. S. (2018) ‘Model Regresi Panel Data dan Aplikasi Eviews’, (2), pp. 1–19. doi: 10.31227/osf.io/vkx2t.

Syahputra, J. (2014) ‘Pengaruh bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten aceh barat’.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Widiasih, N. N. dan Gayatri (2017) ‘Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali’, *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), pp. 2143–2171.

Wulandari, N. (2017) ‘Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi pada Kota Metropolitan di Indonesia dengan Menggunakan Analisis Data Panel’, 3(2), pp. 34–42.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfahmi Rizki Rau Hsb
Alamat : Perumahan Graha Arradea, Blok CB No 5, Kel.
Ciherang, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Jawa Barat
Tempat, Tanggal, Lahir : Padangsidempuan, 08 Juli 1999
Umur : 21 Tahun
Pendidikan

- SD : SDN 200208/21 Padangsidempuan
- SMP : SMPN 2 Padangsidempuan
- SMA : SMAN 5 Padangsidempuan
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 5 Oktober 2021

Peneliti,

(Zulfahmi Rizki Rau Hsb)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Kab/Kota	Tahun	Belanja Modal (dalam Rp)	Produk Domestik Regional Bruto (dalam Rp)	Pendapatan Asli Daerah (dalam Rp)	Dsns Alokasi Umum (dalam Rp)	Dana Alokasi Khusus (dalam Rp)	Dana Bagi Hasil Pajak (dalam Rp)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (dalam Rp)
Nias	2014	158.098.310.000	1.997.749.570.000	65.082.210.000	347.598.829.000	72.092.260.000	9.594.011.000	99.953.320.000
	2015	194.330.739.000	2.108.035.880.000	70.892.624.000	365.879.139.000	148.939.010.000	9.301.834.000	98.535.070.000
	2016	227.559.502.000	2.214.153.330.000	82.840.434.000	440.147.010.000	168.440.788.000	2.029.336.000	121.868.448.000
	2017	239.523.861.000	2.325.014.220.000	95.726.168.000	425.974.369.000	162.194.939.000	10.398.816.000	142.119.954.000
	2018	207.016.877.000	2.429.731.000.000	88.754.606.000	428.657.259.000	170.260.750.000	9.231.326.000	126.994.668.000
	2019	190.454.027.000	2.563.030.000.000	107.629.139.000	443.235.113.000	167.986.948.000	6.934.955.000	92.818.155.000
Mandailing Natal	2014	181.377.548.000	7.034.925.190.000	44.119.212.000	692.133.576.000	59.875.530.000	45.957.386.000	58.792.574.000
	2015	238.677.825.000	7.471.717.540.000	63.847.458.000	722.942.098.000	78.265.060.000	46.681.933.000	113.192.965.000
	2016	248.898.512.000	7.933.132.640.000	70.405.902.000	788.477.434.000	236.585.151.000	23.880.921.000	115.712.802.000
	2017	268.243.398.000	8.416.495.660.000	80.581.689.000	777.487.741.000	246.755.351.000	17.778.360.000	79.253.757.000
	2018	199.849.015.000	8.904.141.190.000	84.809.924.000	783.200.132.000	248.799.514.000	24.728.710.000	48.009.470.000
	2019	206.392.843.000	9.376.460.000.000	98.758.815.000	816.400.130.000	301.779.130.000	14.786.090.000	50.393.780.000
Tapanauli Tengah	2014	102.210.556.000	5.460.846.090.000	55.364.392.000	541.491.907.000	75.689.840.000	18.482.528.000	35.344.986.000
	2015	223.714.662.000	5.738.320.510.000	65.224.735.000	558.241.964.000	174.579.680.000	16.920.250.000	82.706.685.000

	2016	169.402.709.000	6.032.212.590.000	71.758.982.000	633.513.831.000	198.187.850.000	20.181.045.000	93.198.803.000
	2017	167.521.314.000	6.348.241.230.000	72.710.309.000	622.385.030.000	209.061.015.000	16.239.588.000	68.928.299.000
	2018	220.747.371.000	6.678.155.650.000	76.660.883.000	627.027.553.000	241.018.513.000	14.802.301.000	38.653.948.000
	2019	219.450.400.000	7.024.150.000.000	88.441.123.000	670.689.528.000	178.925.114.000	10.228.265.000	100.578.045.000
Tapanauli Utara	2014	146.464.311.000	4.642.325.790.000	63.696.097.000	596.841.256.000	48.316.860.000	18.486.680.000	90.786.681.000
	2015	240.549.906.000	4.869.478.210.000	82.861.214.000	616.216.474.000	123.348.680.000	16.369.055.000	90.786.681.000
	2016	238.928.406.000	5.070.194.850.000	94.783.155.000	650.827.006.000	217.153.190.000	22.479.285.000	119.289.789.000
	2017	155.844.954.000	5.280.688.780.000	162.441.906.000	639.394.068.000	160.718.193.000	21.259.977.000	55.710.585.000
	2018	181.662.031.000	5.510.190.100.000	105.656.763.000	639.394.068.000	191.102.620.000	31.779.942.000	60.633.555.000
	2019	206.383.194.000	5.764.940.000.000	120.736.498.000	659.877.311.000	217.540.917.000	24.454.917.000	52.582.578.000
Toba Samosir	2014	156.147.146.000	4.355.422.460.000	25.924.591.000	495.377.257.000	67.784.130.000	14.593.104.000	104.676.895.000
	2015	154.106.802.000	4.551.510.880.000	30.986.265.000	506.843.572.000	78.487.330.000	13.225.771.000	94.600.740.000
	2016	181.212.965.000	4.767.984.660.000	54.391.304.000	171.553.711.000	-	23.524.850.000	107.759.722.000
	2017	199.230.031.000	5.001.922.470.000	54.480.824.000	528.490.802.000	207.841.807.000	15.358.712.000	71.742.316.000
	2018	152.970.217.000	5.250.302.060.000	52.298.961.000	528.490.802.000	158.583.010.000	14.735.666.000	109.466.370.000
	2019	135.339.350.000	5.505.260.000.000	68.042.531.000	548.690.496.000	172.432.388.000	10.725.324.000	44.265.305.000
Labuhanbatu	2014	209.025.598.000	18.165.101.540.000	109.896.912.000	561.476.208.000	40.224.710.000	37.690.160.000	38.573.108.000
	2015	185.515.383.000	19.080.994.740.000	101.023.216.000	593.025.840.000	76.928.200.000	35.585.445.000	49.495.795.000
	2016	285.089.741.000	20.046.019.120.000	125.925.267.000	696.646.309.000	248.958.333.000	58.151.702.000	42.286.025.000
	2017	277.921.021.000	21.048.165.600.000	124.674.017.000	684.408.474.000	176.514.566.000	46.728.995.000	120.847.379.000
	2018	139.178.414.000	22.112.343.760.000	162.794.472.000	680.408.474.000	199.352.228.000	45.481.438.000	18.127.094.000

	2019	238.729.010.000	23.232.710.000.000	175.335.686.000	686.644.553.000	197.293.028.000	38.027.498.000	89.443.727.000
Dairi	2014	155.712.106.000	5.153.826.260.000	53.525.854.000	532.723.259.000	48.992.230.000	18.581.166.000	58.301.894.000
	2015	180.098.060.000	5.413.748.650.000	58.791.848.000	560.602.194.000	52.697.240.000	13.536.417.000	75.920.335.000
	2016	217.941.187.000	5.688.450.920.000	68.003.242.000	623.702.235.000	147.231.283.000	17.472.043.000	94.271.906.000
	2017	260.705.969.000	5.968.774.080.000	128.489.751.000	612.745.792.000	160.824.790.000	14.846.360.000	0
	2018	201.561.438.000	6.267.821.650.000	73.906.825.000	612.742.762.000	154.914.774.000	13.765.599.000	121.851.799.000
	2019	197.567.865.000	6.569.810.000.000	74.360.339.000	629.145.029.000	182.980.495.000	10.520.265.000	87.947.135.000
Nias Selatan	2014	198.944.305.000	3.356.389.090.000	12.828.006.000	462.793.387.000	90.900.704.000	15.873.656.000	0
	2015	184.978.091.000	3.505.189.390.000	15.037.045.000	468.405.844.000	127.206.270.000	14.363.450.000	0
	2016	122.786.141.000	3.659.767.510.000	16.262.467.000	540.753.627.000	155.744.384.000	13.380.304.000	-64.357
	2017	187.946.733.000	3.826.617.280.000	18.450.267.000	538.282.603.000	218.308.382.000	10.763.913.000	0
	2018	221.305.835.000	4.018.741.070.000	19.605.735.000	556.174.151.000	199.651.553.000	11.850.091.000	122.133.136.000
	2019	238.978.343.000	4.221.040.000.000	25.664.884.000	588.723.530.000	258.903.689.000	8.727.463.000	113.461.403.000
Humbang Hasundutan	2014	223.948.004.000	3.256.188.800.000	29.491.350.000	486.879.958.000	56.959.620.000	15.134.499.000	105.102.117.000
	2015	196.275.197.000	3.406.801.700.000	35.237.806.000	511.805.111.000	57.149.880.000	14.507.909.000	125.726.854.000
	2016	223.630.078.000	3.577.049.060.000	42.096.842.000	533.184.787.000	154.631.301.000	18.570.050.000	127.692.276.000
	2017	224.702.954.000	3.756.663.710.000	85.598.357.000	523.818.445.000	182.472.668.000	11.833.162.000	137.823.895.000
	2018	168.860.964.000	3.946.119.770.000	92.735.854.000	523.818.445.000	142.133.738.000	11.487.984.000	126.725.260.000
	2019	177.278.522.000	4.141.100.000.000	73.757.932.000	536.163.886.000	159.895.201.000	7.619.727.000	123.920.936.000
Pakpat Barat	2014	144.433.403.000	639.390.240.000	15.388.658.000	313.591.345.000	62.184.950.000	14.545.582.000	49.573.062.000
	2015	156.407.390.000	677.432.920.000	15.880.335.000	326.899.366.000	75.644.960.000	12.573.198.000	96.832.632.000

	2016	164.178.920.000	717.891.170.000	18.748.806.000	342.284.663.000	81.437.072.000	13.196.490.000	68.032.683.000
	2017	138.363.427.000	760.552.530.000	29.320.487.000	338.611.130.000	79.655.950.000	9.687.292.000	28.569.119.000
	2018	118.336.627.000	805.008.990.000	20.061.208.000	339.271.690.000	71.532.319.000	10.670.901.000	34.028.904.000
	2019	145.937.022.000	852.300.000.000	33.915.958.000	354.721.524.000	96.835.290.000	7.642.832.000	59.238.031.000
Samosir	2014	167.757.876.000	2.234.088.160.000	46.658.715.000	441.619.455.000	46.700.960.000	11.669.728.000	69.530.390.000
	2015	181.611.819.000	2.367.102.660.000	34.298.410.000	447.470.935.000	59.783.850.000	10.943.516.000	110.279.334.000
	2016	202.913.344.000	2.635.767.600.000	39.268.200.000	459.549.788.000	113.705.971.000	13.892.687.000	105.233.312.000
	2017	224.240.859.000	2.776.846.630.000	72.228.748.000	453.737.230.000	167.496.458.000	11.619.792.000	73.916.691.000
	2018	186.274.945.000	2.931.698.140.000	47.440.830.000	453.737.230.000	139.883.449.000	10.855.233.000	32.001.197.000
	2019	164.093.834.000	3.098.740.000.000	60.497.451.000	465.249.052.000	159.894.073.000	7.906.318.000	24.437.136.000
Padang Lawas	2014	103.210.294.000	6.228.347.950.000	22.172.689.000	418.726.923.000	36.461.510.000	25.006.548.000	55.027.384.000
	2015	226.709.433.000	6.598.599.450.000	26.446.077.000	444.806.362.000	45.656.470.000	12.509.311.000	69.857.925.000
	2016	218.859.097.000	6.991.662.210.000	30.453.223.000	542.199.556.000	152.839.515.000	39.501.475.000	102.035.764.000
	2017	221.963.650.000	7.379.169.680.000	74.524.920.000	537.469.609.000	148.837.538.000	21.610.873.000	111.118.710.000
	2018	204.458.004.000	7.791.202.720.000	74.306.098.000	537.455.568.000	138.216.844.000	21.207.960.000	39.413.288.000
	2019	247.484.629.000	8.228.450.000.000	42.929.112.000	554.953.633.000	186.769.350.000	17.625.484.000	19.443.461.000
Labuhanbatu Selatan	2014	244.955.647.000	14.546.121.720.000	36.386.788.000	450.151.264.000	52.260.920.000	43.151.682.000	77.127.897.000
	2015	258.390.106.000	15.294.507.410.000	32.302.333.000	427.015.380.000	93.295.670.000	48.714.468.000	93.686.742.000
	2016	294.626.135.000	16.088.420.180.000	42.507.928.000	513.547.168.000	155.867.360.000	60.361.226.000	53.026.126.000
	2017	273.152.743.000	16.907.586.050.000	84.964.451.000	504.525.796.000	142.379.982.000	42.446.395.000	67.084.088.000
	2018	219.379.316.000	17.797.948.820.000	52.209.769.000	504.525.796.000	147.933.111.000	57.244.379.000	35.798.687.000

	2019	220.503.869.000	18.750.160.000.000	75.687.648.000	522.907.314.000	131.522.369.000	53.888.046.000	53.344.591.000
Labuhanbatu Utara	2014	213.674.389.000	13.414.526.550.000	32.398.504.000	503.053.678.000	46.487.070.000	29.390.172.000	19.487.993.000
	2015	218.138.402.000	14.109.369.190.000	34.499.899.000	531.602.310.000	76.482.700.000	27.533.727.000	40.243.052.000
	2016	256.257.019.000	14.843.994.450.000	42.296.116.000	592.813.148.000	185.996.231.000	36.027.363.000	30.254.220.000
	2017	204.563.138.000	15.602.046.160.000	52.690.086.000	588.021.836.000	226.696.697.000	23.894.346.000	31.057.098.000
	2018	223.037.632.000	16.413.325.810.000	57.010.691.000	588.021.836.000	235.115.494.000	35.349.065.000	93.063.305.000
	2019	258.116.878.000	17.259.190.000.000	70.122.563.000	611.629.351.000	169.410.066.000	32.849.044.000	151.493.300.000
Nias Utara	2014	141.607.543.000	1.853.284.880.000	10.961.908.000	355.354.627.000	73.951.130.000	9.382.711.000	42.835.324.000
	2015	219.043.274.000	1.954.121.670.000	16.923.884.000	359.841.943.000	137.339.070.000	9.117.697.000	86.439.106.000
	2016	233.739.122.000	2.043.912.940.000	23.852.636.000	410.931.632.000	134.322.395.000	11.397.924.000	69.881.780.000
	2017	251.675.870.000	2.134.490.170.000	20.107.247.000	411.036.299.000	132.618.539.000	9.900.184.000	45.147.533.000
	2018	192.092.727.000	2.228.146.170.000	50.395.505.000	413.338.900.000	138.222.721.000	8.589.289.000	12.992.728.000
	2019	258.215.520.000	2.332.440.000.000	57.961.364.000	429.134.187.000	219.511.307.000	7.153.324.000	15.351.561.000
Nias Barat	2014	153.329.907.000	973.757.080.000	10.298.059.000	279.674.672.000	49.384.690.000	9.800.939.000	56.254.009.000
	2015	187.110.062.000	1.024.925.930.000	14.492.750.000	301.537.799.000	71.201.600.000	7.549.762.000	58.260.195.000
	2016	156.180.258.000	1.074.476.480.000	15.711.221.000	346.451.709.000	57.230.941.000	8.985.613.000	37.343.899.000
	2017	199.747.993.000	1.126.194.810.000	36.239.997.000	344.492.409.000	152.138.174.000	9.253.607.000	8.923.650.000
	2018	247.896.476.000	1.175.929.810.000	40.193.008.000	347.722.710.000	207.417.409.000	9.172.189.000	19.015.220.000
	2019	180.910.491.000	1.236.730.000.000	18.411.236.000	359.696.030.000	194.289.160.000	7.337.602.000	26.903.993.000
Sibolga	2014	105.880.983.000	2.757.268.360.000	52.922.967.000	371.812.825.000	33.880.280.000	14.846.990.000	38.018.367.000
	2015	126.724.782.000	2.913.174.020.000	60.486.786.000	380.075.078.000	90.670.040.000	12.597.296.000	61.289.803.000

	2016	185.382.144.000	3.063.071.360.000	68.537.903.000	412.805.887.000	100.575.079.000	15.347.489.000	81.182.196.000
	2017	124.824.375.000	3.224.576.760.000	103.672.204.000	405.554.215.000	70.813.424.000	13.206.605.000	22.791.905.000
	2018	142.467.823.000	3.393.914.150.000	81.245.734.000	405.554.215.000	90.935.128.000	12.455.402.000	34.207.055.000
	2019	81.569.259.000	3.570.330.000.000	69.311.245.000	422.054.364.000	67.329.016.000	9.431.331.000	14.380.700.000
Tanjungbalai	2014	174.063.400.000	4.392.584.690.000	34.297.306.000	387.259.055.000	34.027.320.000	11.669.020.000	106.652.106.000
	2015	106.723.069.000	4.637.213.880.000	57.094.161.000	398.405.838.000	29.526.528.000	9.617.465.000	0
	2016	131.747.679.000	4.904.544.880.000	64.606.296.000	418.170.504.000	115.756.451.000	13.947.609.000	84.808.082.000
	2017	126.156.230.000	5.174.845.420.000	65.108.267.000	415.172.063.000	83.066.047.000	11.960.863.000	75.891.822.000
	2018	120.906.484.000	5.473.631.270.000	74.435.278.000	418.666.416.000	90.844.606.000	9.794.139.000	34.087.903.000
	2019	96.299.502.000	5.790.370.000.000	63.721.316.000	446.820.629.000	82.010.745.000	15.127.078.000	8.414.529.000
Pematangsiantar	2014	112.533.369.000	7.594.428.820.000	90.477.498.000	519.435.661.000	32.662.570.000	25.752.059.000	28.838.785.000
	2015	152.228.323.000	7.992.371.110.000	95.557.865.000	536.792.310.000	50.467.450.000	20.373.584.000	80.178.361.000
	2016	199.557.081.000	8.380.773.270.000	101.581.324.000	593.532.667.000	129.325.770.000	27.225.038.000	72.961.236.000
	2017	259.217.807.000	8.750.152.850.000	81.112.898.000	583.106.207.000	119.183.584.000	24.966.308.000	158.256.061.000
	2018	287.958.995.000	9.170.185.700.000	137.052.839.000	583.106.207.000	188.366.544.000	21.637.332.000	85.004.454.000
	2019	204.959.072.000	9.611.740.000.000	125.343.187.000	616.197.680.000	172.707.214.000	16.238.405.000	65.649.919.000
Tebing Tinggi	2014	163.582.124.000	3.084.172.070.000	74.515.273.000	385.030.433.000	36.231.720.000	13.921.581.000	64.028.560.000
	2015	158.487.242.000	3.235.299.890.000	82.410.054.000	400.236.724.000	48.429.780.000	12.216.466.000	71.134.638.000
	2016	203.355.262.000	3.400.749.170.000	94.058.492.000	432.437.231.000	125.558.944.000	-	71.414.918.000
	2017	184.156.162.000	3.575.505.220.000	113.222.875.000	423.310.733.000	143.607.096.000	-	13.868.964.000
	2018	203.340.069.000	3.760.504.520.000	114.048.354.000	425.818.195.000	114.868.858.000	214.886.000	26.226.140.000

	2019	153.577.322.000	3.954.030.000.000	105.239.919.000	444.388.755.000	102.896.356.000	-	31.596.840.000
Binjai	2014	153.284.846.000	6.234.288.450.000	71.967.138.000	526.069.678.000	31.534.230.000	25.037.451.000	96.674.842.000
	2015	174.972.076.000	6.571.204.040.000	78.327.793.000	541.895.577.000	40.555.310.000	19.563.488.000	94.526.640.000
	2016	202.943.192.000	6.935.554.010.000	97.339.498.000	574.469.158.000	141.490.578.000	30.240.669.000	51.993.127.000
	2017	154.059.962.000	7.309.571.570.000	139.217.622.000	564.377.582.000	100.753.594.000	23.399.167.000	18.163.185.000
	2018	214.254.227.000	7.708.592.950.000	135.870.920.000	564.377.582.000	129.936.136.000	16.365.563.000	45.604.997.000
	2019	127.213.320.000	8.133.540.000.000	108.954.526.000	585.637.664.000	119.769.919.000	13.449.290.000	0
Padangsidempuan	2014	104.032.328.000	3.287.386.650.000	58.725.450.000	470.353.368.000	38.329.260.000	18.260.847.000	38.250.611.000
	2015	121.667.415.000	3.454.242.550.000	67.730.739.000	481.834.636.000	46.804.080.000	15.607.072.000	70.866.284.000
	2016	159.508.882.000	3.636.872.390.000	78.417.754.000	507.686.451.000	138.084.975.000	19.046.462.000	45.111.413.000
	2017	184.093.967.000	3.830.321.640.000	109.650.318.000	498.768.033.000	156.530.353.000	16.303.454.000	5.194.712.000
	2018	113.072.061.000	4.038.933.410.000	75.063.576.000	498.221.822.000	124.683.309.000	14.443.492.000	24.510.929.000
	2019	137.812.394.000	4.261.320.000.000	87.432.087.000	524.337.438.000	155.239.107.000	10.327.178.000	9.962.329.000
Gunungsitoli	2014	179.745.680.000	2.564.367.810.000	19.164.450.000	383.524.614.000	32.231.500.000	9.796.041.000	80.717.612.000
	2015	187.221.924.000	2.712.863.720.000	24.334.651.000	397.362.423.000	83.927.720.000	8.879.950.000	92.056.238.000
	2016	260.138.209.000	2.876.339.540.000	29.185.405.000	434.259.520.000	165.087.141.000	11.745.196.000	129.864.892.000
	2017	257.218.076.000	3.049.124.560.000	29.769.903.000	426.630.977.000	108.751.821.000	10.539.890.000	130.087.095.000
	2018	183.521.284.000	3.232.969.120.000	29.456.355.000	426.758.929.000	109.906.226.000	15.374.623.000	43.505.020.000
	2019	156.757.477.000	3.428.450.000.000	32.209.064.000	446.102.654.000	99.517.685.000	13.474.485.000	43.507.716.000

Sumber: BPS, 2021

Lampiran 2
Hasil Olah Data Eviews

Common Effect Model

Dependent Variable: BM
Method: Panel Least Squares
Date: 09/01/21 Time: 15:00
Sample: 2014 2019
Periods included: 6
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 138

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.27E+11	1.42E+10	8.988461	0.0000
PDRB	0.002193	0.001174	1.867476	0.0641
PAD	-0.159457	0.099593	-1.601081	0.1118
DAU	-0.069674	0.038730	-1.798977	0.0743
DAK	0.412890	0.057194	7.219113	0.0000
DBHP	0.780437	0.451134	1.729946	0.0860
SILPA	0.420426	0.075217	5.589511	0.0000
R-squared	0.508507	Mean dependent var	1.89E+11	
Adjusted R-squared	0.485996	S.D. dependent var	4.66E+10	
S.E. of regression	3.34E+10	Akaike info criterion	51.35329	
Sum squared resid	1.46E+23	Schwarz criterion	51.50177	
Log likelihood	-3536.377	Hannan-Quinn criter.	51.41363	
F-statistic	22.58915	Durbin-Watson stat	1.344951	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fixed Effect Model

Dependent Variable: BM
Method: Panel Least Squares
Date: 09/01/21 Time: 15:01
Sample: 2014 2019
Periods included: 6
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 138

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.38E+11	4.30E+10	5.524994	0.0000
PDRB	-0.017597	0.005219	-3.371867	0.0010
PAD	0.322757	0.197813	1.631627	0.1056
DAU	-0.110364	0.087742	-1.257827	0.2111
DAK	0.449489	0.077842	5.774407	0.0000

DBHP	0.318391	0.505332	0.630063	0.5300
SILPA	0.477865	0.081295	5.878154	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.712598	Mean dependent var	1.89E+11
Adjusted R-squared	0.638770	S.D. dependent var	4.66E+10
S.E. of regression	2.80E+10	Akaike info criterion	51.13556
Sum squared resid	8.57E+22	Schwarz criterion	51.75071
Log likelihood	-3499.354	Hannan-Quinn criter.	51.38554
F-statistic	9.652142	Durbin-Watson stat	1.982455
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.518344	(22,109)	0.0000
Cross-section Chi-square	74.046122	22	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: BM

Method: Panel Least Squares

Date: 09/01/21 Time: 15:01

Sample: 2014 2019

Periods included: 6

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 138

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.27E+11	1.42E+10	8.988461	0.0000
PDRB	0.002193	0.001174	1.867476	0.0641
PAD	-0.159457	0.099593	-1.601081	0.1118
DAU	-0.069674	0.038730	-1.798977	0.0743
DAK	0.412890	0.057194	7.219113	0.0000
DBHP	0.780437	0.451134	1.729946	0.0860
SILPA	0.420426	0.075217	5.589511	0.0000

R-squared	0.508507	Mean dependent var	1.89E+11
Adjusted R-squared	0.485996	S.D. dependent var	4.66E+10
S.E. of regression	3.34E+10	Akaike info criterion	51.35329
Sum squared resid	1.46E+23	Schwarz criterion	51.50177

Log likelihood	-3536.377	Hannan-Quinn criter.	51.41363
F-statistic	22.58915	Durbin-Watson stat	1.344951
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect Model

Dependent Variable: BM
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/01/21 Time: 15:02
Sample: 2014 2019
Periods included: 6
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 138
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.36E+11	1.97E+10	6.888013	0.0000
PDRB	0.001818	0.001419	1.280937	0.2025
PAD	-0.079385	0.123445	-0.643083	0.5213
DAU	-0.084704	0.049604	-1.707592	0.0901
DAK	0.386337	0.056122	6.883933	0.0000
DBHP	0.758395	0.446743	1.697610	0.0920
SILPA	0.421581	0.073226	5.757245	0.0000

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	1.81E+10	0.2933
Idiosyncratic random	2.80E+10	0.7067

Weighted Statistics

R-squared	0.429084	Mean dependent var	1.01E+11
Adjusted R-squared	0.402935	S.D. dependent var	3.80E+10
S.E. of regression	2.94E+10	Sum squared resid	1.13E+23
F-statistic	16.40930	Durbin-Watson stat	1.704140
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.501965	Mean dependent var	1.89E+11
Sum squared resid	1.48E+23	Durbin-Watson stat	1.296462

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.698112	6	0.0047

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB	-0.017597	0.001818	0.000025	0.0001
PAD	0.322757	-0.079385	0.023891	0.0093
DAU	-0.110364	-0.084704	0.005238	0.7229
DAK	0.449489	0.386337	0.002910	0.2417
DBHP	0.318391	0.758395	0.055781	0.0625
SILPA	0.477865	0.421581	0.001247	0.1109

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: BM

Method: Panel Least Squares

Date: 09/01/21 Time: 15:03

Sample: 2014 2019

Periods included: 6

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 138

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.38E+11	4.30E+10	5.524994	0.0000
PDRB	-0.017597	0.005219	-3.371867	0.0010
PAD	0.322757	0.197813	1.631627	0.1056
DAU	-0.110364	0.087742	-1.257827	0.2111
DAK	0.449489	0.077842	5.774407	0.0000
DBHP	0.318391	0.505332	0.630063	0.5300
SILPA	0.477865	0.081295	5.878154	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.712598	Mean dependent var	1.89E+11
Adjusted R-squared	0.638770	S.D. dependent var	4.66E+10
S.E. of regression	2.80E+10	Akaike info criterion	51.13556

